**Serial Diskusi Publik**

**MENJAGA HUTAN, MENJAGA INDONESIA :
Peran Bisnis Kehutanan dalam Mencapai FOLU Net Sink 2030.**

Hari : Kamis, 16 Juni 2022

Waktu : 09.32-12.17 WIB

**Galuh** **Sekar Arum (Moderator) :**

Baik, terima kasih videonya. Selamat pagi. Selamat datang di Serial Diskusi Publik Forest Digest dan Yayasan Madani Berkelanjutan: Menjaga Hutan, Menjaga Indonesia. Dan dengan tema diskusi pertama pagi ini, yaitu Peran Bisnis Kehutanan dalam Mencapai FOLU Net Sink 2030. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Galuh dan saya akan memandu jalannya diskusi hari ini.

IFNET (Indonesia FOLU Net Sink) atau sederhananya adalah penyerapan karbon yang lebih besar dari pelepasan karbon, di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya menjadi *trending topic* di dunia kehutanan dan lingkungan. Terutama setelah Ibu Menteri LHK memperkenalkan istilah tersebut di pertemuan PBB tentang perubahan iklim (UNFCCC COP 26) di Glasgow akhir tahun lalu.

Alih2 jadi kontributor emisi terbesar (sebesar 40%) dari deforestasi dan alih fungsi lahan), sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU) akan bertransformasi menjadi penyerap karbon. Sejak itu banyak diskusi yang terjadi tentang FOLU Net Sink dan menyusul ada Surat Keputusan Menteri LHK no. 168 tentang Dokumen Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030. Isinya berbagai aspek teknis mulaio dariistilah, kebijakan, target lokasi implementasi dan peran serta kaitannya dengan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam upaya mendukung implementasi rencana tersebut.

Diskusi ini merupakan yang pertama dari rangkaian 5 diskusi publik yang akan dilaksanakan oleh Forest Digest dan Yayasan Madani Berkelanjuta, sebagai bentuk dukungan terhadap rencana implementasi Indonesia FOLU Net Sink (IFNET). Kali ini sengaja kami ingin mengajak anda untuk berdiskusi dengan pihak swasta yang terdampak sekaligus dapat memberikan dampak besar dalam implementasi rencana ini. Tentunya juga ada dari pemerintah dan akademisi yang akan memperkaya diskusi kita pada pagi hari ini. Sudah terdapat bersama kita 4 narasumber yang akan saya perkenalkan nanti kepada anda, namun sebelum itu, saya mengundang 2 orang untuk memberikan sambutan sekaligus memantik diskusi kita pagi ini. Yang pertama yaitu CEO Forest Digest, Kang Asep Suntana, selamat pagi Kang Asep. Silakan Kang Asep.

**Asep Suntana (CEO Forest Digest)** :

Terima kasih Teh Galuh, Assalamualaikum wr wb. Salam sejahtera untuk kita semua.Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua, terima kasih kepada Yayasan Madani yang telah menggandeng Forest Digest di dalam acara yang menarik pagi ini. Tentu saya sampaikan terima kasih kepada narasumber, kepada Pak Istanto, Pak Dodik, Pak Dharsono dan Pak Purwadi. Dan tentu terima kasih saya sampaikan kepada kawan-kawan yang telah menyediakan waktu, untuk hadir dan kemudian mendiskusikan tema penting pagi ini.

Selamat datang sekali lagi di acara diskusi dengan semangat menjaga hutan dan menjaga Indonesia. Seperti kita ketahui kawan-kawan semua, kita sudah lama mendiskusikan banyak hal terkait pengelolaan hutan lestari. Banyak pihak terlibat di dalamnya, pemerintah tentu saja kemudian LSM, kalangan swasta dan yang terpenting adalah keterbukaan publik untuk mulai terlibat di dalam proses-proses diskusinya. Mari kita teruskan langkah menari ini.

Kawan kawan semua target ITTO 2000 adalah langkah pertama sebetulnya, ketika seluruh dunia bergerak mendiskusikan ulang bagaimana caranya menghasilkan produk kehutanan (kayu) secara berkelanjutan. Namun kemudian seperti yang disampaikan oleh teh galuh tadi, adapergerakan menarik dari hanya berbasis kayu (produk-produk tertentu), kemudian kita memasuki dengan apa yang disebut sebagai “*Multi Interest Forestry*”. Mungkin kawan-kawan sudah terbiasa mendengar multi usaha, mlti produk, multi jasa, dst. Dan hari ini kita secara khusus mendiskusikan apa yang kita sebut sebagai IFNET (Indonesia FOLU Net Sink). Yang merupakan paket kebijakan menarik, dari rangkaian kebijakan yang selama ini sudah diperkenalkan oleh pemerintah.

Kawan-kawan semua, beberapa pertanyaan penting sudah mulai mengemuka berkenaan dengan IFNET. Misalnya, apakah kebijakan ini sudah melingkupi berbagai aspek seperti semangat *Multi Interest Forestry* tadi. Apakah sudah berkaitan erat dengan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dan berkaitan erat dengan perubahan iklim. Terutama terkait dengan usaha-usaha berbasis lansekap. Atau ada upaya lain berbasis kelautan. Dan apakah IFNET mendorong pengelolaan hutan di 3 pilar penting dari hutan tropis di Indonesia, yaitu keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan ekologi dan tentu saja keberlanjutan sosial.

Kemudian apakah program bersifat komprehensif? Jangan jangan masih bersifat parsial. Apakah program seperti dugaan panitia, dapat mendorong pada sebuah tema besar : Menjaga Hutan, Menjaga Indonesia.

Lalu bagaimana dengan *cost cutting issue*? Mungkin kawan-kawan sudah mulai mengenal dengan apa yang disebut GEDSI (Gender Equality Disabilty and Social Inclusion), bagaimana dengan *safe guard* dan *knowledge management* yang dibangun bersamaan dengan konsep IFNET ini.

Pertanyaan di atas membuat kami bersemangat untuk menyelenggarakan kegiatan ini bersama Yayasan Madani. Kami perlu sampaikan sebagai pengampu/ pengelola Forest Digest, kami patut berbangga, bahwa berbagai naskah dari obrolan semacam ini yang kami terbitkan sebagai artikel, lembar fakta, infografis yang kemudian menjadi rujukan-rujukan menarik. Baik di level pendidikan, kemasyarakatan, bahkan di level kebijakan. Ada sebuah lembar fakta yang ditranslasi oleh sebuah lembaga internasional ke dalam bahasa inggris, dan kemudian menjadi bahan diskusi di level internasional (terutama di Benua Eropa). Hari ini, kita coba diskusikan beberapa hal penting dari IFNET, dan kita susun lembar faktanya.

Sering diskusi menjadi kawah candradimuka, gagasan yang tadi disampaikan dari awal. Bagaimana kita meluaskan informasi ke publik, bagaimana kita mengajak ke publik kemudian mendiskusikan secara detail apa yang perlu kita susun. Dan bagaimana kita merekomendasikan langkah-langkah penting ini ke berbagai pihak. Sudah ada di forum ini wakil-wakil dari pemerintah, swasta dan bahkan ada kawan yang langsung terjun mengelola kawasan hutan di dalam kaca mata komersil.

Mari kita gali sekali lagi data, informasi, pengetahuan dari forum ini. Kami dari Forest Digest mengucapkan terima kasih sekali lagi pada sleuruh pihak yang menunjang acara ini. Forest Digest dan Yayasan Madani mengucapkan selamat berdiskusi. Terima kasih, saya Asep Suntana, CEO Forest Digest.

**Galuh Sekar Arum (Moderator) :**

Terima kasih, Kang Asep atas sambutan dan pertanyaan-pertanyaan pemantiknya yang bernas dan menggelitik. Mudah-mudahan semuanya dapat terjawab dalam diskusi pagi ini. Selanjutnya saya mengundang Mbak Nadya Hadad, Direktur Eksekutif Yayasan Madani. Barangkali ingin menambah pertanyaan yang akan memacu semangat kita berdiskusi pada pagi ini. Selamat pagi Mbak Nadya, silakan ambil alih layar.

**Nadia Hadad (Direktur Eksekutif Yayasan Mardani Berkelanjutan)** **:**

Selamat pagi Mbak Galuh, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum wr wb. Salam sejahtera juga untuk semuanya. Pertama-tama mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi juga kepada para narasumber yang telah hadir di sini, ada Bapak Ir. Istanto, Prof. Dodik, Pak Dharsono dan Pak Purwadi Suprihanto. Madani juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Forest Digest, yang sudah berkolaborasi dengan kita untuk menyelenggarakan acara diskusi ini (ada 5 seri). Terkait dengan isu yang kita angkat ini memang sangat penting. Kita mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia, yang sudah mengeluarkan kebijakan FOLU Net Sink 2030. Dimana ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia yang semakin kuat utuk mengendalikan dampak dari krisis iklim. Kita memiliki target *net zero emission* di pertengahan abad ini. Ini adalah langkah penting untuk menjuju kesana.

Di dalam ITCC *report* yang terbaru, para ilmuwan telah mengingatkan pada seluruh dunia, pada kita semua bahwa tanpa kebijakan dan aksi yang kuat menuju 2030, kita tidak bisa menahan kenaikan suhu di bawah 1,5°C (batas umum). Bahkan tanpa aksi kenaikan suhu bumi diprediksi bisa sampai 3°C. Hal itu akan sangat fatal untuk kita semua. Sayangnya di dalam laporan itu juga mengatakan bahwa komitmen iklim dari seluruh dunia yang ada sekarang belum cukup untuk melakukan perubahan/ menghasilkan perubahan untuk menekan pemanasan global 1,5°C tersebut.

Kita sebagai bangsa Indonesia sudah membuat komitmen yang kita tahu semua yang tertuang dalam NDC, untuk sektor FOLU khususnya, dimana kita harus berkontribusi 17,2% dari target 29%. Dengan ada berbagai skenario, dari yang satu hingga ambisius. Selain itu pemerintah punya strategi untuk pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim, yang kita kenal sebagai LTS-LCCR 2050. Di dalam strategi tersebut ada beberapa skenario, dimana yang paling ambisius adalah skenario LCCP yang diproyeksikan akan mengalami puncak emisi bersih pada 2030 sebesar 1.244 juta ton CO2e, yang nanti akan berujung pada kondisi *net zero emission* di tahun 2030/ lebih cepat, skenarionya.

Tapi melalui skenario yang paling ambisius itu pun sebenarnya perlu upaya yang serius. Kalau ingin mencapai Net Sink FOLU sebenarnya masih kurang, belum cukup upayanya yang dilakukan sekarang untuk dapat mencapai target Net Zero Emision tersebut. Di dalam skenario Net Sink FOLU, yang bertujuan untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK), sebenarnya strateginya sudah lumayan dan cukup baik jika memang diimplementasikan dengan baik untuk mencapai target yang kita harus capai. Madani sendiri sebagai lembaga yag mengadvokasikan dan melakukan beberapa kajian dan menganalisa terhadap tata kelola dan hutan Indonesia, kami menemukan bahwa yang paling menonjol adalah komitmen iklim yang saat ini kita jalankan, Indonesia masih memiliki kuota deforestasi sebesar 2,4 juta ha hingga tahun 2030. Sedangkan di dalam target FOLU Net Sink, kuota deforestasi Indonesia sebenarnya sudah minus, kalau menurut bacaan kami. Kalau salah mohon dikoreksi. Kalau kita lihat sebenarnya sudah tidak ada ruang lagi untuk deforestasi. Sementara kita harus menjalankan berbagai aspek pembangunan dengan macam-macam rencana. Kit ajuga harus melihat target dalam FOLU Net Sink dapat dijadikan sebagai pijakan untuk meningkatkan ambisi iklim Indonesia.

Saya setuju dengan pernyataan Kang Asep yang sebelumnya bahwa kita sudah saatnya beranjak dari paradigma yang memandang manfaat dari nilai ekonomi hutan hanya dari kayu. Bahwa sebenarnya banyak potensi yang dapat dimanfaatkan guna mewujudkan pembangunan ekonomi dan meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat. Namun begitu dengan semangat yang optimis, penerapan kebijakan FOLU Net Sink ini, sebagaimana untuk memastikan bahwa realisasi dan implementasinya bisa berjalan efektif, harus ada sinergitas antara perencanaan pengelolaan hutan dan juga sembari memaksimalkan peluang-peluang yang ada. Serta kontribusi dari berbagai pihak, termasuk pelaku usaha. Untuk mendukung kebijakan yang ambisius ini kita perlu mempunyai modalitas yang tinggi. Dan karena itu kolaborasi itu sangat penting, antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Semua harus sama sama bekerja sama mencapai target dan komitmen iklim untuk kepentingan kita sendiri, maupun dunia.

Oleh karena itu dalam rangkaian diskusi kali ini kita akan sama-sama menggali kebijakan FOLU Net Sink ini, harapannya. Dan juga melihat dampak dari implementasi ini, kebijakan ini, juga bagaimana kita bisa saling melalukan sinergitas antar *stakeholders*. Semoga dengan diadakannya serial diskusi ini akan menambah pemahaman, pengetahuan dan juga bahan masukan. Kita juga bisa sama-sama bekerja secara lebih *real* untuk berkontribusi dalam mencapai FOLU Net Sink 2030 dan *net zero emission* di tahun 2050 (sesuai dengan porsinya masing-masing). Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum wr wb.

**Galuh Sekar Arum (Moderator) :**

Walamualaikum wr wb. Terima kasih banyak Mbak Nadia. Aduh aku dengernya sambil deg-degan. Dengan target, dengan angka-angka. Agak deg-degan tapi jadi semangat. Seperti yang disampaikan Mbak Nadia, kita memerlukan modalitas, tentunya modalitas kita terbatas tapi kalau berkolaborasi maka akan menjadi besar. Mari kita eksplor, bagaimana dalam diskusi ini kita bisa saling berkolaborasi. Saya sendiri yakin percaya bahwa kita semua punya visi misi yang sama. Tinggal kita mencari cara kita masing-masing dan berkolaborasi untuk mencapai hal tersebut bersama-sama. Saya rasa sudah mulai hangat ruang diskusi kita dan mudah-mudahan tetap hangat hingga kurang lebih pukul 12 siang nanti. Tapi sebelum mulai dan memperkenalkan pembicara, saya mau cek dulu bapak ibu yang hadir silahkan coba tuliskan di *chat box* bapak dan ibu *join* dari kota mana dan satu kata yang terlintas ketika mendengar IFNET.

((Intermezzo))

Baik, mari kita eksplor bersama. Terima kasih atas sharingnya bapak dan ibu. Bagaimana pemahaman kita semua terhadap FOLU Net Sink, walaupun sudah beberapa bulan (± 8 bulan) sejak pertama kali dicanangkan. Saya bahagia sekali menyampaikan bahwa bersama kita sudah ada 4 pembicara, para ahli di bidang masing-masing. Yang pertama Ir. Istanto, M.Sc, beliau adalah Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan di Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, KLHK. Lalu ada Prof. Dodik Ridho Nur Rohmat, beliau adalah Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University. Dan juga ada Pak Darsono Hartono, CEO PT Rimba Makmur Utama, selamat pagi Pak Darsono. Lalu ada juga *last but not least* ada Pak Purwadi Suprihanto, Sekjen APHI. Selamat pagi Pak Pur. Sebelum mulai bapak dan ibu, jika anda memiliki pertanyaan kepada narasumber silakan *chat box* dengan format nama\_pertanyaan untuk siapa\_pertanyaan. Sehingga kita bisa membantu menjawab pertanyaan bapak dan ibu. Bagi narasumber, masing-masing waktu presentasi sekitar 15 menit. Saya mohon izin di awal untuk colek bapak kalau waktunya sudah habis, dan silakan menyelesaikan presentasinya dalam waktu 1 menit.

Yang pertama, saya mohon izin untuk memanggil Pak Istanto. Selamat pagi pak, selamat bergabung. Kami sudah menunggu paparan/ *sharing* dari bapak, perspektif bapak terhadap IFNET, lalu mungkin cerita-cerita bagaimana tata kelola, kebijakan-kebijakan dan kami ingin tau target keseluruhan bidang PHL dalam rencana FOLU Net Sink. Baik mungkin itu dulu pak, nanti kita akan berdiskusi. Kalau sudah siap silakan boleh di-*share* dan waktunya sekitar 15 menit.

**Ir. Istanto, M.Sc. (Direktur Bina Usaha Usaha Pemanfaatan Hutan, KLHK) :**

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, teman-teman para narasumber terutama yang sering bertemu terutama Prof. Dodik. Yang saya hormati juga dari Yayasan Madani berkelanjutan dan Forest Digest. Yang saya hormati para peserta yang hadir melalui zoom meeting.

Baik, mungkin nanti saya sampaikan beberapa hal yang penting2. Kalau waktunya 15 menit tidak semua bisa kami sampaikan. Tadi sudah banyak disinggung oleh moderatornya, pengetahuan tentang FOLU nya lebih lengkap daripada saya. Tadi sudah lengkap juga disampaikan oleh Ketua Yayasan Madani Berkelanjutan dan Kang Asep. Saya akan melengkapi saja apa yang sudah disampaikan teman-teman.

FOLU ini singkatannya bukan main, lebih mudahnya disingkat IFNET 2030. Jadi ini adalah salah satu upaya Indonesia untuk mencapai (tentunya kesepakatan-kesepakatan) penurunan emisi GRK ini juga mungkin memang salah satu upaya khususnya dari sektor kehutanan. Dulu idenya ada FOLU ada agriculture nya, tapi khusus untuk FOLU kita hanya berbicara dari segi Forestry nya. Forest and other land use. Dan target sampai 2030 seperti apa nanti kita bisa sampaikan.

Kalau kami khususnya di Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), bagaimana kita memadukan antara *Sustainable Forest Management*, *Environmental Governance* dan *Carbon Governance*. Sehingga bisa saling menunjang dan untuk mencapai target IFNET, kita juga harus saling mendukung. Tidak hanya di PHL saja. Memang PHL merupakan tulang punggung di sektor kehutanan dalam mencapai target IFNET 2030.

Sebagai gambaran untuk ruang ligkup IFNET ada 15 *items*. Tidak semuanya ada di PHL, jadi 15 *items* ini cukup banyak lingkupnya. Ruang lingkup cukup besar, contohnya di no.1 yakni pengurangan laju deforestasi lahan mineral. Ini tentunya juga tidka hanya PHL, tapi ada juga nanti kawasan konservasi, ada HPK juga. Sekarang HPK banyak mengalami gangguan. Walaupun status areanya HP, tapi karena memang untuk konversi, karena kondisi hutan masih bagus sehingga kita masih tetap pertahankan menjadi HPK. Sebelum dilepas menjadi APL. Ini juga banyak kasus-kasus di beberapa provinsi.

Kemudian juga contohnya ada pengurangan laju deforestasi lahan gambut dan magrove. Dan magrove juga bukan hanya di kawasan HP dan HL/ kawasan konservasi. Tetapi ada juga yang di luar kawasan hutan. Contohnya yang ada di APL atau di lahan masyarakat. Ini juga tantangannya cukup berat karena nanti ditentukan oleh peran pemerintah daerah/ masyarakat.

Kemudian ada juga pengurangan laju degradasi hutan lahan mineral. Ada kaitannya dengan PHL. Sampai kepada 15 ruang lingkup, yang paling penting yang terkait dengan swasta karena kaitannya dengan tema diskusi hari ini, mungkin nanti bisa disampaikan oleh Pak Pur bisa sampaikan juga peranannya seperti apa. Kami dari segi kebijakannya. Jadi memang ini yang terkait dengan kebijakan-kebijakan khususnya untuk PHL, khususnya lagi untuk dunia usaha. Sebenarnya kami sudah banyak memberikan izin di areal-areal lahan gambut/ mangrove, ada HPH, HTI dan RE kepada sebanyak ± 17 perusahaan. Sebagian besar berada di lahan gambut atau mangrove.

Tentunya hal ini juga sangat berkaitan dengan pembangunan hutan tanaman (dibawah binaan PHL). Beberapa areal berada di lahan gambut, mineral dan mungkin di gambut dalam. Hal ini juga penting sekali disinggung terkait peranan dari pemegang izin yang berada di gambut dalam, contohnya.

Kemudian terkait dengan pengelolaan hutan lestari, ada beberapa kegiatan yang langsung bisa mendukung kegiatan-kegiatan IFNET 2030. Selanjutnya rehabilitasi dan rotasi. Kaitannya dengan HTI, karena setelah ditanam mereka diperbolehkan menebang. Juga ada rehabilitasi non rotasi, biasany abeberapa kegiatan yang ada di HPH (pengkayaan, silin, dll). Kemudian ada restorasi gambut dan perbaikan tata air gambut, ini sangat terkait dengan HTI. Karena sebagian besar HTI yang mengelola gambut sudah kami berikan Rencana Kerja Usahanya berdasarkan kepada pemulihan lingkungannya yang terkait nanti dengan gambut dan perbaikan tata air gambutnya. Jadi yang terkait dengan PHL ini memang cukup banyak sehingga FOLU ini tulang punggungnya berada di PHL.

Rehabilitasi mangrove dan aforestasi pada kawasan bekas tambang, kaitannya dengan Ditjen PDAS-RH. Ada juga konservasi keanekaragaman hayati, kaitannya dengan KSDAE, perhutanan sosial dengan PSKL dan yang lainnya. Yang jelas sasaran yang ingin dicapai dari FOLU ini adalah implementasi Rencana Operasional *Indonesia’s* FOLU *Net Sink* 2030 untuk mencapai penurunan tingkat emisi gas rumah kaca sebesar **140 juta ton CO2e pada tahun 2030.** Cukup besar sebenarnya target yang ingin dicapai dan juga mendukung *net zero emission* sektor kehutanan dan guna memenuhi NDC yang menjadi kewajiban nasional Indonesia sebagai kontribusi bagi agenda perubahan iklim global, dengan memperhatikan visi Indonesia yang lebih ambisius dalam dokumen LTS-LCCR.

Pengelolaan Hutan Lestari ada beberapa kegiatan yang sangat-sangat penting yang nanti juga ingin kita laksanakan. Kita sudah menentukan target-target dari NDC sampai tahun 2030. Salah 1 contoh di tabel bisa saya sampaikan, untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengelolaan hutan alam (dulu HPH, sekarang disebut PBPH). Ada dua kegiatan penting untuk mendukung IFNET pada pemanfaatan kayu di hutan alam yang tumbuh alami. Contohnya, SILIN dan RIL. Ini 2 kunci yang menentukan untuk keberhasilan mencapai IFNET 2030.

Data yang kami peroleh dari teman-teman swasta, **luas RIL dan SILIN tahun 2019 masih sangat kecil. Masih di angka 167.000 ha untuk SILIN dan RIL 269.000 ha.** Artinya target belum tercapai, masih jauh dari yang kita tentukan. Kemudian nanti di tahun 2024, kita harus mencapai 1.589.000 ha untuk kegiatan SILIN dan RIL. Kemudian kumulatifnya di tahun 2030 harus bisa mencapai 3.105.000 ha. Dengan sisa kuota 2.669 juta ha. Hal ini menjelaskan bahwa peningkatan serapan untuk hutan sekunder, baik melalui kegiatan pengayaan maupun RIL merupakan salah satu aksi kunci untuk sektor kehutanan dan lahan dalam mencapai target net sink. Pada saat target yang kita sudah tentukan sampai tahun 2030, 1,3 juta ha dan 2,2 juta ha ini memang target yang cukup ambisius. Tetapi kami juga sangat berharap dukungan khususnya dari asosiasi seperti APHI dan teman-teman swasta. Karena menuju net sink (LTS-LCCP) pada tahun 2030 cukup besar 3,1 juta ha dan 2,2 juta ha. Kira-kira seperti ini gambaran umumnya. Ada 2 kegiatan penting yang nantinya bisa mendukung IFNET 2030, yaitu SILIN dan RIL/ RIL-C.

Bapak ibu sekalian ini kira2 proyeksi kebutuhan dan skema pendanaan untuk aksi mitigasi IFNET 2030, cukup berat. Kebutuhan pendanaan cukup berat, cukup besar. Kami sudah diskusi di internal, bagaimana pendanaan IFNET. Mungkin nanti teman-teman dari FD bisa mendukung atau dari teman-teman swasta/ dari yang lain.

Bukan main, dana yang diperlukan dalam rangka mencapai target contohnya PHL, ini memang cukup besar dalam trilyun paling tidak 1,3 T. Saya belum terbayang anggaran dari mana. Mungkin ini menjadi bahan diskusi kita. Dan memang beberapa alternatif pendanaan melalui *carbon market*, non *carbon market* dan juga melalui RBP- REDD+. Untuk RBP-REDD+ sudah ada yang memperoleh dana, tetapi khusus untuk dulu disebut dengan RE. RE yang sudah mendapat pendanaan dari luar, tetapi ini memang belum sesuai dengan prosedur sehingga perlu kita perbaiki lagi untuk kedepannya.

Jadi memang sumber pendanaan dari pemerintah dipastikan melalui optimasi pendanaan di tingkat pusat/ APBN dan juga melalui instrumen *green sukuk* dan pasar karbon domestik (Nilai Ekonomi Karbon). Kami kemarin diskusi dengan Ibu Dirjen PPI, kita sedang menggodok SK Menteri untuk nilai ekonomi karbon yang nanti bisa dilakukan perdagangan karbon oleh swasta. Ini butuh pembahasan lebih lanjut. Apabila Permen sudah ada mungkin swasta akan lebih semangat. Karena ada ketentuan-ketentuan yang dibolehkan untuk perdagangan karbon. Apakah itu PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) HTI atau HPH dan yang jelas sudah pasti yang dulu bernama RE. Memang arahnya ke sana.

Peran bisnis kehutanan untuk IFNET 2030, nanti kita bisa beri gambarannya. Kira2 yang sudah saya sampaikan, kita memandang hutan kalau dulu mungkin hanya kayunya. Tetapi untuk ke depan, hutan sebagai satu kesatuan ekosistem, jadi *landscape management* nya ini nanti hutan bisa dipengaruhi oleh kelola sosialnya/ ekonominya dan dipengaruhi juga oleh lingkungan. Akhirnya nanti pada saat operasional di lapangan memang banyak sekali kadang-kadang kita juga harus bersentuhan langsung dengan masyarakat, bersentuhan dengan LSM-LSM lingkungan, dan juga hal-hal lain yang kadang-kadang perlu disinkronkan antara swasta dengan masyarakat maupun pemerintah daerah yang ada di lapangan.

Sehingga nanti pengelolaan perhutanan sosial dan perizinan berusaha harus menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian yang perlu kami sampaikan bahwa PBPH dan multi usaha kehutanan ini nanti juga memang saya kurang menguasai. Ada pakarnya, Prof. Dodik mungkin nanti bisa banyak menjelaskan. Tapi kalau dari sudut kebijakan ini memang sebenarnya PBPH bisa melalukan lebih dari 1 jenis kegiatan. PBPH yang sudah berjalan selama ini, dia bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan yang lain. Tetapi memang selama ini masih ada kendala. Terutama untuk perubahan dokumen lingkungan.

Bagaimana proses perubahan dokumen lingkungan mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Pur. Hal ini juga masih banyak kendala yang dihadapi, sehingga memang kalau dari teorinya multi usaha ini kelihatannya mudah. Pengusaha-pengusaha di bidang kehutanan, memang dibutuhkan penyesuaian dokumen lingkungan, sebelum melakukan kegiatan-kegiatan multi usaha. Hal ini mungkin nanti juga menjadi bahan diskusi kedepannya.

Tetapi yang jelas selama ini, PBPH-HA/ PBPH-HT ini konsentrasi/orientasinya hanya kayu. Tetapi nanti ke depan bisa dengan multi usaha. Mereka bisa melakukan *agroforestry*, kombinasi antara tanaman bawah dengan tanaman kopi atau dengan jenis tanaman obat atau tanaman lain dengan satu kesatuan kegiatan yang kita sebut dengan multi usaha kehutanan. Untuk teorinya bisa disampaikan oleh Prof. Dodik sebagai ketua tim pakar multi usaha.

Ini sebagai gambaran yang kita sebut dengan multi usaha. Multi usaha bisa dilakukan di Hutan Lindung (HL) maupun Hutan Produksi (HP). Kalau di HP bisa semua, mau beternak sapi juga boleh. Disitu juga akan mengembangkan usaha perikanan juga boleh. Mengembangkan prod kayu/ HHBK juga boleh. Tetapi kalau di HL hanya dapat dilakukan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan (wisata) dan usaha hasil hutan bukan kayu. Silvofishery, silvopastura dibolehkan. Artinya bahwa untuk pemanfaatan HP & HL melalui pemberian perizinan berusaha yang kita sebut dengan berusaha pemanfaatan hutan multi usaha.

HL bukan berarti tidak boleh dimanfaatkan. Sudah banyak yang sudah diberikan izin, baik izin perhutanan sosial maupun izin pemungutan dan juga izin pemanfaatan. Jasa lingkungan juga sudah banyak yang mengajukan izin untuk di hutan lindung. Namun memang masih perlu ditelaah kembali. Karena sebagian besar HL sudah masuk ke arah pemanfaatan ke PIPPIB. Artinya hanya dibolehkan untuk jasa lingkungan, karbon dan terbatas untuk HHBK. Padahal sebenanrnya HL sudah diberikan arahan untuk PIPPIB sangat penting untuk mencapai target-target IFNET.

Sampai dengan saat ini kita sudah memberikan izin IUPHHK-HA yang aktif 213 unit dan yang tidak aktif 44 unit. Sedangkan IUPHHK-HTI sebanyak 231 unit yang aktif dan 67 unit yang tidak aktif. Nantinya yang tidak aktif sedang kami evaluasi, kalau memang berkomitmen untuk melanjutkan kegiatan, memiliki dana yang cukup maka bisa dilanjutkan. Tapi hanya diberi waktu dari hasil evaluasi dan klarifikasi selama 6 bulan. Apabila setelah 6 bulan tidak ada realisasi di lapangan maka akan kita cabut. Dan akan kita serahkan ke pengusaha yang memang serius untuk melanjutkan usahanya.

Dalam rangka optimalisasi multi usaha kehutanan, sekarang kita dorong terus agar terutama yang tidak aktif ini bisa aktif. Kemudian yang sudah aktif dan sudah bagus bisa terus ditingkatkan. Termasuk nanti juga kegiatan-kegiatan di RE (sekarang PBPH), akan kita arahkan ke depannya banyak melibatkan masyarakat, memulihkan lingkungan dan mengatasi konflik-konflik yang selama ini banyak terjadi.

Manfaat agroforestri ini merupakan salah satu multi usaha yang dapat dilakukan di areal PBPH tadi. Sekarang orientasinya bukan hanya kayu tetapi juga ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ada juga pemanfaatan jasa lingkungan. Ini juga banyak yang sudah mengajukan permohonan izin, sekitar yang masuk ke kami sudah ada 80-an permohonan izin. Sebagian besar nanti arahnya untuk pemanfaatan jasa lingkungan. Sehingga memang pemanfaatan jasa lingkungan nanti ada kegiatan-kegiatan pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan lingkungan atau penyerapan dan/ atau penyimpanan karbon. Kedepannya izin-izin ini kita dorong dan kita berikan kemudahan dan kita juga sudah menyesuaikan peta arahannya walaupun PIPPIB, arahan Ibu Menteri meskipun ditutup untuk perizinan baru kalau PIPPIB diberikan kesempatan untuk kegiatan pemulihan lingkungan, penyerapan dan penyimpanan karbon. Karena sifat kegiatannya tidak merusak lingkungan tetapi justru malah akan memperbaiki lingkungan yang sudah rusak.

Tentunya nanti kita juga butuh dukungan regulasi khusus untuk pemanfaatan karbon (nilai ekonomi karbon) dari Perpres 98 tahun 2021. Ada beberapa Permen yang sedang dipersiapkan Ditjen PPI, ada 2 atau 3. Dan nanti PHL juga khusus untuk pemanfaatan dunia usaha, kami mempersiapkan 1 Permen untuk pengaturannya.

Untuk SILIN dan RIL karena keterbatasan watu tidak dapat kami sampaikan. Tadi sudah banyak saya singgung untuk SILIN dan RIL yang menjadi tulang punggung di PBPH khususnya di HA. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum wr wb.

**Galuh Sekar Arum (Moderator) :**

Waalaikumsalam wr wb, terima kasih atas paparannya dan mohon maaf karena waktunya singkat. Diharapkan nanti banyak terjadi diskusi. Sudah ada banyak pertanyaan masuk, nanti bisa Pak Is pilih untuk dijawab secara langsung/ dijawab secara tertulis di *chat box* atau kalau mau di excel yang sudah kita pindahkan, nanti akan kita bantu pindahkan ke *chat box*.

Berikutnya kita ke Prof. Dodik, apakah sudah hadir di sini Prof. Dodik? Silakan Prof, tadi sudah banyak disinggung multi usaha kehutanan. Saya kemarin juga mengikuti fodcast nya bersama Kang Bagja tentang multi usaha kehutanan. Jadi menarik juga untuk mendengar lebih lanjut lagi. Silakan prof.

**Prof. Dodik Ridho Nurrochmat (Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB University) :**

Pagi Mbak Galuh. Oke baik, terima kasih, Assalamualaikum wr wb. Menyampaikan sedikit tentang peran bisnis kehutanan dalam mencapai FOLU net sink 2030. Sesungguhnya bisnis kehutanan sudah memasuki era baru. Era multi usaha kehutanan, PBPH sebetulnya adalah multi usaha kehutanan. Isinya multi usaha kehutanan. Peraturan yang terkait tidak akan saya sampaikan, karena sudah sangat sering. Apa kaitannya dengan IFNET. Sesuai dengan nama konstitusi harus berkeadilan, harus berkemakmuran, berkelanjutan. Harus sesuai dengan kaidah keilmuan (logis dan sistematis), harus memastikan target dapat tercapai (terukur&*evidence based*, *achievable*, membangun optimisme).

Dengan kaitan dengan iklim, bukan climate equality. Jadi nanti kita juga tetap bekerja secara profesional (komitmen) tapi juga terukur dan juga pas menempatkan diri. Indonesia sudah memiliki target penurunan emisi 29% dengan kemampuan sendiri atau 41% dengan dukungan pihak yang lain. Kalau hitung-hitungan saya tentu saja tidak bisa. Negara lain juga hanya sekedar segitu. Ini menurut saya, kita sudah sangat bagus. Kita memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sangat baik tetapi kita harus juga menuntut negara lain untuk berperan lebih besar. Karena kalau kita turun emisi 29% dari emisi total per kapita yang hanya 2,1 ton per kapita/ tahun, masih sangat jauh dari rataan per kapita emisi dunia yang sudah 4,7 ton.

Kalau kita bicara Indonesia jangan emisi total. Karena mohon maaf kalau emisi total, kita buang angin bersama-sama saja itu emisinya sudah banyak. Hitungan yang adil yang memenuhi *climate justice* itu harus emisi per kapita, bukan total. Emisi per kapita kita hanya 2 ton. Emisi rata-rata dunia itu 4,7 ton jadi saat ini kita setengahnya saja tidak sampai. Kalau kita sudah mau menurunkan 29%, bahkan 41% itu sebetulnya harus diapresiasi oleh dunia. Jangan mencela, sebenanrnya kita sudah baik hati dan tidak sombong. Kalau negara maju juga sama hanya sekitar 25-40% ya tidak cukup.

Mereka kebanyakan negara industri, 20-30 ton, bahkan beberapa negara timur tengah seperti Qatar hampir 40 ton per kapita/ tahun. Nah kita 2 ton diturunkan lagi 40% tinggal 1 koma sekian ton. Rataan dunia masih 40,7 ton. Mereka turun 50% saja dari 40 masih 20 ton, masih 10x lipat Indonesia lebih saat ini. Itu yang *real emission*, kalau FOLU bukan *real emission*, tapi potensi emisi. Hal ini berbeda. Kita bicara berbeda. Makanya kalau kita lihat datanya PBB, world bank, pasti dipisahkan antara emisi dan FOLU. FOLU net sink adalah niatan baik kita. Harus kita hargai niatan baik kita. Jangan juga kita jadi merasa tertuduh utama, mental yang tidak baik. Kit aharus proporsional. Bertanggung jawab terhadap dunia tapi pada saat yang sama kita juga harus memperjuangkan keadilan (*climate justice*). Jangan menempatkan diri kita sebagai *victim*. Kita harus sebagai *lead*. Indonesia saja yang emisi per kapitanya baru 2 ton/ tahun sudah mencanangkan FOLU net sink. Mudah-mudahan tercapai. Apalagi negara industri maju. Mestinya begitu semangatnya. Jangan dibalik juga, kita tidak perlu menurunkan kalau begitu. Ibaratnya kita naik kapal bersama, kita tau kalau kapal ini nggak ditutup bolong-bolongnya, itu akan karam. Nah Indonesia sebetulnya bolong-bolongnya kecil-kecil. Kita berinisiatif menutup meskipun bolongnya masih kecil. Karena kecilnya banyak, kita tutup. Tapi yang bolongnya gede itu mustinya nutupnya sama dengan outputnya. Sama dengan yang bolong kita yang kecil itu. Bukan presentasenya sama. Tidak adil karena yang satu bolongnya besar yang satunya kecil. Hal ini kadang *inferior syndrome* yang harus kita hilangkan.

Kemudian juga harus bisa mengurai akar masalah, bukan gejala masalah. Kalau masalah kemiskinan, ketertinggalan itu akar masalahnya apa, ketidak adilan. Apakah itu FOLU net sink? Misalnya multi usaha kehutanan bisa mengurai masalah-masalah ketidak adilan. Sehingga gejala masalah itu tidak akan terasa di masa yang akan datang. Ini menjadi persoalan juga.

Kemudian hal yang lain adalah fakta bahwa makin tinggi pertumbuhan per kapita, di seluruh penjuru dunia makin tinggi emisinya. Kalau kita ingin menurunkan emisi, ada resiko. Ini penelitian saya dengan mahasiswa di Papua, menunjukkan bahwa dengan berbagai opsi, saya ambil opsi yang tertinggi, yang bisa menurunkan emisi sampai tahun 2031, alhamdulillah sesuai dengan simulasi, emisinya kemungkinan di tahun 2031 akan menurun drastis. Tapi ketika saya minta untuk membuat simulasi PDFB, ternyata sama PDRB nya juga ikut turun. Ini kan kacau kalau begini. Ini tidak boleh kita laksanakan, karena *green development* itu jalan lain untuk mencapai kemakmuran dengan degradasi lingkungan yang minim. Kata kuncinya *prosperity*, ada *growth* (pertumbuhan), ada kesejahteraan yang meningkat. Emisi karbon menurun tapi semakin miskin kan juga repot. Bukan seperti itu yang kita tuju. IFNET ada strateginya, kita optimis tapi juga bisa terukur.

Kemudian kita juga tidak boleh membawa standar ganda dengan IFNET atau apapun namany, atas nama iklim, atas nama apapun tidak boleh ada standar ganda. Kalau kesejahteraan kita itu memiliki kendaraan, memiliki rumah yang layak huni dsb, kita tidak boleh memandang ‘sok bijak’ kepada saudara kita yang ada di hutan. Jangan menempatkan saudara kita sebagai museum hidup. Itu juga tidak etis. Kalau 1-2 orang seperti itu oke, tapi lihatlah sebetulnya yang sesungguhnya diinginkan itu apa.

Studinya Novotny, saya ketemu langsung. Kita presentasi di Bali. Beberapa studi dia, di negara-negara Asia di suku-suku pedalaman, terutama di Papua New Guinea, menunjukkan bahwa masyarakat tradisional sebenarnya tidak ingin hidup di hutan seperti sekarang ini terus menerus. Dia paparkan contoh, dia membuat studi kecil, anak-anak kecil di zona REDD diminta untuk menggambar. Bagaimana keinginan anak-anak terkait kondisi desanya di masa yang akan datang. Semua ingin menggambar ada jalan, ada mobil, adafasilitas telekomunikasi dan lain sebagainya. Sama dengan kita. Sehingga nanti IFNET ini lokusnya harus hati-hati. Kalau di Jawa di tempat lain jelas kita harus menurunkan dalam jumlah yang cukup besar, oke. Kalau sodara kita di pedalaman Kalimantan, masa Cuma sekedar untuk punya sepeda motor, sekedar untuk punya jalan saja nggak boleh.

Kadang-kadang diantara kita ini mikirnya juga aneh. Bikin jalan di hutan kan sulit ya. Harus ada izin pinjam pakai. Ini urusannya pidana. Jangankan jalan, bikin tiang listrik saja sulit. “Pak kan sekarang sudah era digital. Tidak perlu lagi fisik.” Ya digital, tapi kalau misalkan bisnis, digital itu sistem, *marketing* nya. Kalau produknya sendiri kan tidak. Contoh kita pesan makanan *online*, kan cara memesannya yang *online*, makanannya kan nggak *online*. Tetap ada fisiknya, produk itu harus fisik. Jadi akses jalan itu penting. Digital itu sistem manajemennya. Tapi misalnya mau kirim alpukat, duren, kayu kan dikirimnya butuh sarana transportasi. Sama dengan kalau kita pesan makanan *online*, pesannya saja *online*, makanannya kan ga mungkin. Kita juga gamau, dilihat saja silakan lihat di hp anda, dinikmati. Sama dengan ini, bisnis apapun kalau nggak boleh ada jalan, percuma, tidak akan menarik. Jadi ini yang harus kita perhitungkan. Idealisme harus terukur semuanya.

Ini untuk IFNET, kelestarian lingkungan, akseptabilitas sosial dan kelayakan ekonomi. Saya rasa juga. Kemudian saya sering menyampaikan juga yang disebut *sustainability* itu tidak berati kemudian *zero degradation*. IFNET juga tidak sama dengan *zero deforestation*. IFNET juga tidak sama dengan *carbon net sink*, tidak sama dengan kita tidak boleh mengeluarkan emisi. Tidak sama ya, kita bernafas saja mengeluarkan emisi kok. Tetapi emisi yang kita keluarkan harus lebih rendah *sink*-nya. Maksudnya seperti itu. Jadi tetap boleh, karena kita membangun segala macam, tidak sedikit pasti juga ada gangguan terhadap lingkungan.

Tapi sepanjang kita masih bisa beradaptasi, dan sepanjang gangguan itu masih bisa boleh (reversibel), maka itu masih dalam konteks *sustainability*, itu pilihan. Kita membangun, rusaknya agak banyak, pulihnya cepet, atau rusaknya sedikit tapi pulihnya lama. Itu kan pilihan sebetulnya ya. Kalau kita lihat di dalam kurva, antara dua garis putus-putus merah. Jadi tidak ada yang lebih baik, sesuai dengan konteksnya masing-masing. Sepanjang berada diantara 2 garis putus-putus itu dia *sustainable*. Lewat dari itu (*irreversibility line*) bahaya, bencana. Kalau dibawah garis, kurang manfaatnya. Disebut *resources waste*. Pemborosan sumber daya. Kan kita juga tidak perlu minum dengan aquades. Main air rebus biasa nggak masalah. Tidak semua harus *zero.*

Dan yang paling penting adalah sasaran target IFNET, yaitu **pengurangan emisi 140 juta ton CO2e pada tahun 2030.** Biaya yang dibutuhkan ± 200 trilyun. 80% diharapkan biaya diperoleh dari sektor privat. Sektor privat mau kalau menarik. Tidak cukup hanya kapasitas, kawan-kawan KLHK dan tim ahli harus kita berikan apresiasi, sudah bisa menyusun rencana operasional IFNET, dengan dokumen yang sangat lengkap. Tapi untuk implementasikan itu saja tidak cukup. Kapasitas untuk membuat dokumen saja tidak cukup. Implementasi tidak cukup hanya kapasitas tapi perlu isi tas. Sektor privat hanya tertarik kalau ada daya tarik ekonominya tentu saja. Jadi di dalam rencana operasional IFNET, deforestasi tidak identik dengan IFNET. Kalau sudah IFNET 2030 kok masih ada deforestasi? Sampai tahun 2050 masih ada deforestasi. Simulasi saya juga masih ada. Menurut IPCC *net sink* sebelum tahun 2060. Jadi deforestasi pasti masih ada. Tetapi rehabilitasi, reforestasi dan aforestasi kalau ditotal *sink*-nya harus lebih kecil dari *source*-nya. Itu yang dimaksud dengan IFNET, bukan sama dengan *net zero deforestation*.

Pengertian FOLU adalah *the forest and the OLU. Other land use* hanya dimasukkan ke dalam IFNET kalau dia 30% melebihi dari tutupan lahan hutan. Menjadi masuk ke dalam kategori hutan walaupun dia bukan kawasan hutan. Jadi penting ya definisi hutan itu kita ikuti. Karena ini multi usaha kehutanan, bukan multi usaha perkebunan. Tutupan minimal luas hutan 30%, luas minimal lahan 0,25 ha dan tinggi minimal pohon dewasa 5 meter. Dan kita juga jangan hanya melarang dan mengancam, tapi berikan solusi.

Di lampung, di hutan lindung dengan berbagai macam tanaman buah-buahan tetapi sepanjang dia memenuhi persyaratan menjadi hutan. Ini yang kita bisa lakukan, bekerja sama dengan petani, dengan anak-anak muda. *One village one CEO.* Kami sudah bekerja sama selama 3 tahun, sudah ekspor ke 11 negara, produk-produk kami. Ini dapat direplikasi. Bisnisnya bagus. IFNET memiliki peluang.

Potensi IFNET yaitu ada 35 juta ha Kawasan Hutan yang tidak berhutan. Sedangkan peluangnya *single liason* *for all business activities ­*(PBPH), satu izin untuk semua. Kegiatan tentu saja juga merupakan peluang untuk merealisasikan potensi tadi. Kemudian kendala dan anacamannya, PNBP nya belum terintegrasi. Dirjen PHL baru akan membahas PNBP bersama DPR tanggal 18. PNBP harus juga kalau saya mengusulkan sistem kontrak, basisnya lahan. Ditarik di muka sesuai dengan usulan dari rencana bisnis. Bisnis yang menjadi pedoman. *Business plan* dari RKU. Selain itu dokumen lingkungan yang harus diganti, harus disederhanakan.

Kemudian ada ancaman, *conflict of interest*. Baik sektoral, antara masyarakat dan pelaku usaha. Ini yang sangat penting, yang sangat banyak sering terjadi di sektor kehutanan adalah *holding* dan perusahaan anak. Kalau *holding*-nya punya interest yang berbeda, ini sulit. Walaupun multi usaha. Dikhawatiirkan mengurangi target holding. Oleh karena itu, ini info saja, PBPH yang saat ini izin prinsipnya sudah keluar, multi usaha yang baru, ada 4 kalau tidak salah, *background*-nya bukan perusahaan kehutanan. Saya baru saja dari Papua, di sana sudah ada 5 perusahaan yang mengajukan PBPH, sesuai dugaan, kelima-limanya bukan perusahaan kehutanan. Pertanyaannya ada apa dengan kita, kawan-kawan di perusahaan kehutanan? Kenapa kok multi usaha yang berminat sangat banyak tetapi justru bukan perusahaan kehutanan. Apakah sudah berada di posisi enak/ terikat dengan kebutuhan *holding*.

Untuk karbon yang harus kita perhatikan adalah *leakage* dan *economic leakage*. Bagaimana PDRB dengan emisi, *economic linkage* yang rendah, bagaimana karbon dengan nilai ekonomi karbon, kan berbeda. Kalau kita berbica dengan karbon tidak sama dengan nilai ekonominya. Harga karbon mungkin belum tentu bisa menggantikan nilai ekonomi kayu. Tidak bisa menggantikan *chainsawman*, tukang meubel, spg meubel, dsb.

Kemudian dari aspek legalitas dan legitimasi ada kepemilikan lahan dan penguasaan lahan. Juga ada aspek standar dan sistem verifikasi. Saya beberapa hari ini banyak diskusi dengan teman-teman yang di karbon, mana saja yang prinsip dan mana saja yang teknis. Karena campur sekali dua hal tersebut. Sehingga sampai saat ini, perdagangan karon domestikpun masih belum direalisasikan. Walaupun, yang berminat sudah sangat banyak. Kemudian mekanisme perdagangan dan Sistem Registrasi Nasional (SRN) juga harus jelas, sehingga perdagangan karbon minimal untuk domestik (kalau internasional belum). Untuk domestik harus ada regulasinya, terpisah dari regulasi internasional. Masuk ke dalam sistem registrasi nasional. Saya rasa demikian, terima kasih. Wassalamualaikum wr wb.

**Galuh Sekar Arum (Moderator) :**

Waalaikumsalam wr wb. Terima kasih Prof. Dodik atas semangat dan juga kritik maupun pertanyaan yang cukup menggelitik dari beberapa kawan-kawan. Ada beberapa hal yang sudah ditanyakan oleh para peserta baik yang ada di kolom *chat* maupun yang sudah dipindahkan di excel. Prof. Dodik bisa nanti memilih bisa menjawab secara langsung ataupun memberikan jawaban tertulis di *chat* *box*.

Kalau untuk saya masih ada banyak pertanyaan, tapi harus saya tahan dulu karena belum saatnya sesi tanya jawab. Dan kita akan beralih ke narasumber kita yang ketiga. Selamat siang Pak Dharsono, CEO PT Rimba Makmur Utama.

**Dharsono Hartono (CEO PT Rimba Makmur Utama) :**

Selamat siang bapak dan ibu sekalian, sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih FD dan Yayasan Madani yang telah menghadirkan saya pada hari ini.

**Galuh Sekar Arum (Moderator) :**

Terima kasih kembali pak. Dan saya juga penasaran nih, kalau dari perspektifnya Pak Dharsono, seperti apa. Apalagi tadi disinggung dan dicolek, saya juga tertarik kalau dari perspektifnya PT RMU seperti apasih peluang untuk IFNET. Bagaimana pihak swasta bisa berkontribusi. Tadi ada yang bilang cuan juga. Kalau butuh modal yang sekian besar, apa cuannya juga bisa masuk. Kalau Prof. Dodik kemarin di fodcast bilang nilai *revenue*-nya dari lahan belum terlihat kalau dari IFNET. Apakah itu bisa memungkinkan kita sama-sama menggabungkan modalitas swasta untuk mencapai IFNET ini. Silakan Pak Dharsono, saya berikan waktu 15 menit.

**Dharsono Hartono (CEO PT Rimba Makmur Utama) :**

Terima kasih. Saya rasa pertanyaan yang sangat bagus. Yang pasti untuk mencapai IFNET 2030, kita perlu kontribusi dari swasta. Kita butuh hampir 160 T. Uang darimana untuk bisa melakukan kegiatan ini? Saya lumayan optimis karena Indonesia itu merupakan salah satu negara yang memiliki hutan yang berlimpah, yang memiliki lahan gambut, memiliki mangrove, tapi harus ada kegiatan dan inisiatif, serta regulasi yang benar-benar meyakinkan. Seperti yang disampaikan Prof. Dodik, swasta akan investasi apabila ada *clarity* dari segi peraturannya. Apa keuntungannya. Saya melihat tren belakanganan (10 tahun terakhir), banyak perusahaan yang ingin melakukan investasi yang untuk kegiatan yang memiliki tujuan. Salah satu kegiatan IFNET bisa menjadi hal yang benar-benar investor ingin lakukan. Akan tetapi, harus ada kepastian dari segi regulasi. Bagaimana mekanisme untuk mendapatkan keuntungan dsb.

Sebelum itu kami bisa *share* pengalaman kami di Katingan Mentaya Project. Sekitar 15 tahun yang lalu, Indonesia menjadi tuan rumah COP 13 di Bali. Istilah Net FOLU belum ada waktu itu, yang psti istilahnya yang terkenal saat itu REDD+. Jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu kita ingin lakukan untuk mencegah deforestasi dan degradasi hutan. Yang dijual dari kegiatan ini adalah jasa lingkungannya. Yang dijual dalam bentuk karbon kredit popularnya. Saya ingin *share* pengalaman kami selama 15 tahun ini melakukan kegiatan Katingan Mentaya Project. Bagaimana kita bisa melihat hanya dengan bekerja sama dengan masyarakat secara transparan, melakukan kegiatan yang benar-benar bisa meningkatkan produktivitas masyarakat tanpa menebang, tanpa membakar, kita bisa menuju ke IFNET 2030.

Sebelum PBPH dulu namanya Restorasi Ekosistem (RE). PT RMU merupakan salah satu pemegang Izin RE di Kalimantan Tengah. Cuma cara kita memandang hutan itu beda, seperti yang dibicarakan tadi, hutan itu jangan hanya dilihat dari kayunya saja. Justru kita ingin melihat ini sebagai berbagai macam penghasil manfaat dengan memadu-serasikan antara usaha kehutanan dan konservasi melalui pengelolaan bentang alam berbasis ekosistem. Jadi inisiatif ini dijalankan dalam bentuk usaha jasa lingkungan dengan memanfaatkan mekanisme perdagangan kredit karbon.

Sebagai gambaran. KMP merupakan proyek karbon kredit dari sektor lahan yang paling besar di dunia. Dari segi jumlah, emisi yang telah kita bisa cegah. Walaupun areal kami hanya 157.000 ha, dibandingkan dengan proyek-proyek di dunia lainnya, ada yang sampai 2 juta ha, kita berpotensi menurunkan emisi lebih tinggi dari mereka karena kita berada di lahan gambut yang penuh dengan karbon. Kami bertujuan untuk mengurangi emisi karbon, melindungi keanekaragaman hayati serta menciptakan peluang pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berpihak juga kepada masyarakat. Kami bermitra aktif dengan 34 desa, jadi komitmen itu jelas bahwa kegiatan itu benar-benar bukan hanya melihat masalah lingkungan, bahkan lebih pentingnya masalah komunitas.

Lokasi kami di Kalimantan Tengah. Areal 157.000 ha, dari segi hitungan karbonnya bisa mencegah hampir sekitar 7,5 ton/ tahun. Akan tetapi banyak juga pekerjaan yang kita lakukan karena ancaman kebakaran hutan dan gambut di Kalimantan. Seperti yang kita ketahui itu adalah hal yang biasa 20 tahun terakhir kita harus bekerja keras, untuk mencegah terjadinya kebakaran/ degradasi dengan bekerja sama dengan masyarakat.

Sebenarnya kunci keberhasilan suatu proyek karbon itu kita harus bermitra dengan masyarakat lokal untuk perubahan transformatif. Saya secara pribadi berubah itu susah. Masyarakat dengan pendekatan yang benar, cara kita berkomunikasi dengan mereka, bagaimana kita merubah cara bertani mereka yang tadinya menggunakan kimia dan membakar kita ubah menjadi tanpa kimia dan bakar. Dan proses ini memerlukan waktu yang cukup lama. Kami di KMP sudah 15 tahun, sehingga modal sosial sudah cukup kuat untuk bisa meyakinkan masyarakat bertani tanpa bakar dan kimia bisa menghasilkan lebih baik.

Sebagai gambaran areal kami ada di 34 desa. Ini semua kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Walaupun izin kami lokasinya tidak bersentuhan dengan desa-desa pada umumnya, tetapi kami berkomitmen bekerja sama dengan masyarakat di luar areal karena mereka menjadi kunci keberhasilan untuk menjaga dan melakukan kegiatan restorasi ekosistem di daerah perizinan kami.

Salah satu kegiatan yang kami lakukan adalah kredit mikro. Kami telah bekerja sama dengan masyarakat (berbasis masyarakat) yang cukup banyak yang kita lakukan, ini sangat berhasil. Kemudian ada juga saya singgung bertani, pertanian. Bahwa kami awalnya sangat susah meyakinkan petani-petani untuk melakukan kegiatan tanpa kimia dan bakar. Saya ingat saya mengunjungi sekitar 10 desa, tahun 2015. Saya menawarkan bertani cara ini. Dari ratusan petani yang saya temui, hanya 2 petani yang tertarik untuk kegiatan ini. Alhamdulillah saat ini kami sudah memiliki sekolah agroekologi. Kami bekerja sama dengan banyak petani, dan kami bisa saling belajar dari petani-petani bagaimana kegiatan tanpa bakar dan kimia jauh lebih memberikan hasil produktivitas yang tinggi dan harga yang didapatkan bisa lebih tinggi.

Tadi juga sempat disebut modalnya itu agroforestri. Bukannya kami menolak, atau tidak menyukai sistem monokultur, tetapi untuk kegiatan RE kami melihat agroforestri ini memang lebih cocok. Selain itu karena lokasi kami berbatasan dengan sungai, jadi ada 2 sungai (Sungai Katingan dan Sungai Mentaya), layanan sanitasi kami lakukan juga. Karena kebiasaan juga di desa-desa itu, jamban biasanya di samping sungai. Kita banyak melakukan kegiatan yang memindahkan jamban ke dalam rumah. Secara studi kita bisa lihat jauh lebih efektif dan baik untuk segi kesehatannya.

Selama covid ini juga banyak kegiatan-kegiatan kami untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Ada kegiatan posyandu, dan lain sebagainya. Vaksin yang telah kami lakukan di daerah Sampit. Waktu itu hampir sekitar 20.000 masyarakat yang berpartisipasi. Kami juga melihat bagaimana potensi-potensi lokal, bagaimana yang kita bisa manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan RE kami. Salah satu yang kami lihat ada keranjang bibit dari purun. Dimana kami bekerja sama dengan masyarakat, mereka kami bina untuk bisa membuat ini sehingga kami bisa membeli dari mereka secara langsung. Kegiatan produksi keranjang ini bisa kami jadikan kegiatan restorasi dan penanaman di daerah sekitar KMP.

Bambu juga merupakan satu hal yang kami lihat sebagai potensi, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan masyarakat. Mengelola bambu untuk kegiatan-kegiatan yang bisa menggantikan kayu pada akhirnya. Kalau kita lihat KMP itu kan berada di bawah PT RMU, jadi kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu berbasis masyarakat. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan masyarakat, untyk semua kegiatan yang berhubungan dengan restorasi, berhubungan dengan penanaman. Dan bahkan kita juga melihat potensi-potensi *lively hood* masyarakat yang bisa kita bantu. Salah satu kegiatan yang kami lakukan adalah persemaian berbasis masyarakat, mendukung kegiatan pembibitan pohon yang diperlukan oleh PT RMU sesuai dengan RKU dan RKT yang akan kamu lakukan.

Di luar areal kami ternyata kami lihat ada potensi kelapa. Ada perkebunan masyarakat kelapa di luar konsesi kami. Kami bekerja sama dengan perusahaan Unilever, melihat potensi bagaimana kita bisa mengolah gula kelapa. Seperti yang kita ketahui, gula kelapa di Kalimantan Tengah itu bukan hal yang lazim, dibandingkan di Jawa. Sehingga kami melihat potensi ini sangat luar biasa karena penghasilan dari gula kelapa itu jauh lebih besar dibandingkan hanya dengan mengambil kopra. Sayangnya masyarakat belum mengerti, bagaimana mengolah/ mengahsilkan produk ini. Sehingga kami bikin sekolah dan *training center*. Alhamdulillah sekarang sudah hampir ratusan petani-petani yang berubah menjadi petani gula kelapa. Dan bahkan kami punya *brand* sendiri, namanya “Mentaya Sweet” yang sangat dibanggakan. Kualitasnya tidak kalah dan bahkan lebih bagus dibandingkan dengan gula kelapa di Jawa.

Tidak kalah penting juga kami melakukan bantuan infrastruktur. Dari kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, karena kita sudah mendapatkan pendapatan dari karbon itu kami bisa melihat potensi-potensi bagaimana kita bisa melakukan pembangunan infrastruktur desa, seperti jalan, sekolah dan balai pertemuan.

Tidak kalah penting juga sektor pertanian-perikanan, karena kami melihat potensi perikanan (desa berbasis di sungai). Jadi ada salah satu desa yang kami melihat potensi ikan gabus untuk bisa kit akelola menjadi albumin. Mudah-mudahan dalam 1-2 tahun kedepan bapak dan ibu sekalian bisa mendengar kabar dari KMP, bagaimana kita bisa bukan hanya melihat potensi perikanan dasar, bahkan kita bisa *lead frop* ke industri yang jauh lebih *hi-tech­* kepada masyarakat. Sehingga kita bisa menghasilkan produk-produk yang menurut kami itu memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dan lebih bermanfaat untuk masyarakat.

Tidak kalah penting penanggulangan kebakaran, seperti kita ketahui setiap tahun apabila selama masa kemarau, kami melakukan banyak kegiatan sosialisasi dan bahkan bekerja sama dengan masyarakat penanggulangan kebakaran berbasis komunitas. Sebagai informasi, PT RMU itu memiliki pegawai sekitar 200 orang, akan tetapi pada saat musim kemarau itu kita memperkerjakan 600 orang untuk mencegah kebakaran yang berbasis masyarakat.

Untuk generasi baru kami melihat penting kita bisa meningkatkan kesadaran lingkungan. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di desa-desa, SD, SMP/ SMA. Staf-staf RMU memberikan gambran pekerjaan mereka kepada masyarakat, bagaimana kita melihat kesadaran tentang kebakaran hutan dan lahan serta upaya pencegahannya.

Terakhir, melihat tantangannya sebenarnya kalau kita lihat dari IFNET ini bagaimana sih? Jadi yang perlu kita harus ada kejelasan peraturan mengenai nilai ekonomi karbon. Banyak sekali pihak swasta yang ingin menginvestasi di bidang ini karena mereka melihat bidang ini sangat menjanjikan. Tetapi bidang ini juga bisa memberikan dampak yang luar biasa dan memiliki nilai tujuan yang sangat baik. Jadi menurut saya penting pemerintah Indonesia memberikan kejelasan peraturan mengenai nilai ekonomi karbon.

Kita bekerjsa bersama-sama APHI, Pak Dodik, dan lain sebagainya. Dan pemerintah membuat kondisi pendukung ekosistemnya. Sehingga akhirnya investor bisa dan yakin untuk melakukan kegiatan ini. Tidak kalah penting juga kita perlu mekanisme pasar yang kredibel. Tidak mungkin swasta investasi tanpa ada cuan, tapi yang kita perlu ketahui kali ini cuannya tidak dengan menebang pohon justru dengan memperkaya lingkungan kita, menambah kesejahteraan pada masyarakat dan saya rasa ini bisnis satu-satunya yang bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa, positif kepada dunia, Indonesia bahkan masyarakat. Itu saja dari saya, terima kasih.

**Galuh Sekar Arum (Moderator) :**

Terima kasih banyak Pak Dharsono. Wah ini juga banyak pembelajaran dari KMP yang bisa kita tiru. Sudah ada pertanyaan yang masuk di *chat box*, silakan jika ingin menanggapi secara langsung maupun secara tertulis nanti. Nanti juga bisa tek tokan sesi tanya jawab dengan Pak Is ya, karena soal mekanisme, kejalasan peraturan, yang saya sampaikan tadi sebenarnya kita semua punya visi yang sama. Kemudian kit aingin hutan terjaga, kita ingin dapat untung juga, tapi mungkin harus ketemu nih caranya seperti apa. Sebelum ke tanya jawab ada satu lagi APHI, Pak Pur yang akan juga bercerita/ berbagi pandangannya dari sudut pandang Asosiasi Perusahaan Hutan Indonesia. Selamat siang Pak Pur. Silakan Pak Pur. Mungkin ada nambah-nambah pertanyaan untuk berdiskusi atau mungkin ada juga beberapa hal yang bisa dijawab oleh Pak Pur pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah muncul. Silakan berbagi perspektif APHI Pak Pur.

**Purwadi Soeprihanto (Sekjen APHI) :**

Assalamualaikum wr wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah mengundang APHI. Tadi saya kira apa yang disampaikan Mbak Galuh betul sekali, apa *statement*-nya Pak Istanto. Saya jadi ingat, kata-kata seorang filsuf Cina mengatakan untuk membuat sebuah gagasan, ide dan merubah perilaku, memang perlu kegiatan-kegiatan yang berulang. Pengenalan harus dilakukan berkali-kali. Perlu paling tidak 21 kali pengulangan, supaya perilaku kita berubah, supaya paradigma kita berubah. Dan supaya pemahaman kita juga melekat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan khawatir, bapak/ibu yang baru mengikuti IFNET hari ini berarti masih kurang 20 hari lagi.

Baik bapak/ibu sekalian kami diminta untuk memberikan masukan tentang bagaimana peran dan strategi bisnis kehutanan dalam kerangka pencapaian Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Beberapa materi barangkali ada irisan dengan materi-materi sebelumnya. Tetapi nanti saya akan cepat saja. Kita akan melihat bagaimana perspektif bisnis dan strategi yang harus kita lakukan bersama nanti. Beberapa saya petik dari Prof. Dodik, saya terkesan sekali dengan beberapa temuan beliau. Meskipun ini sudah dirasakan juga oleh teman-teman dan APHI.

Tantangan pengelolaan hutan saat ini, ditengah-tengah upaya-upaya kita mendorong mendorong Net sink FOLU. Situasi produktivitas hutan yang rendah, kata Pak Dodik nilai lahan tanah kita itu per m2 tidak lebih mahal dari satu buah pisang goreng. Hanya 2000/4000 ya Prof. Dodik kurang lebih atau hanya Rp. 400,-/m2. Dibandingkan dengan sektor holtikultura/ agrikultur yang bisa sampai.

Kita juga bisa melihat bagaimana pengelolaan hutan saat ini yang masih bertumpu pada kayu dan pengelolaan yang basisnya RKT/tahun. Jadi sebagai contoh misalnya kalau kita mengelola HPH taruhlah misalnya 20.000 ha, kit ahanya mengelola 1.000 ha sementara 19.000 ha akan dibagi menjadi 20 tahun berikutnya. Sehingga areal-areal itu masih banyak yang tidak kita manfaatkan di luar RKT. Sehingga areal efektif yang dikelola juga belum optimal dan karena kayu masih menjadi sasaran/ target utama, tingkat kelayakan usaha rendah.

Bapak/ ibu sekalian bisa lihat saat ini indutsriu-industri kehutanan yang saat ini berbasis kayu, yang tidak terintegrasi dengan industri di sektor hilirnya, rata-rata sangat sensitif sekali dengan perubahan-perubahan permintaan. Banyaknya HPH dan HTI tidak aktif misalnya, salah satunya karena mereka tidak banyak terintegrasi dengan industri. Oleh karena itu, saya kira ketika kita berbicara pengelolaan-pengelolaan yang pion timber ini menjadi sebuah ide dan gagasan segar baru bagaimana meningkatkan bisnis kehutanan.

Tentu juga kita dihadapkan dengan problem-problem sosial, kebutuhan-kebutuhan penduduk. Kemudian pangan, pertanian dll. Ini juga mendorong dan meng-*encourage* permasalahan-permasalahan sosial dan tenurial. Kita juga masih mencatat kontribusi sub-sektor kehutanan terhadap PDB nasional masih belum beranjak dari angka 0,6% dari luas kawasan hutan 66% dari luas daratan Indonesia. Saya kira ini tantangan-tantangan yang harus kita respon. *At least* pada saat kita mencoba untuk memposisikan diri, mencapai target IFNET yang memang dikedepankan pada sektor kehutanan yang cukup besar, 17%.

Ini ilustrasi yang teman-teman sudah hafal, tetapi saya ingin mengulang-ulang bahwa hasil hutan kayu itu hanya 5% dari potensi sumber daya hutan. 95% nya belum banyak kita manfaatkan, jadi sayang. Kita mengelola 5% baru menghasilkan kurang lebih kontribusi terhadap PDB yang tadi 6%, padahal kita punya 95% yang belum kita manfaatkan. Kita tahu punya HP 30.000.000 ha yang sudah diberikan, masih ada kurang lebih 30.000.000 ha lagi HP. Ini potensi yang saya kira harus banyak didorong untuk bagaimana kehutanan ke depan bisa bersaing dengan sektor-sektor lainnya. Saya belum bicara FOLU ya.

Pasca Undang-undang Cipta Kerja, saya kira kita akan beranjak/ bergeser paradigma kita, bagaimana kehutanan kedepan akan dikelola dalam bentuk *landscape*. Dalam arti ada fungsi-fungsi sosial, lingkungan, produksi, dan itu nanti akan bergabung dengan kegiatan-kegiatan perizinannya. Tidak hanya semata-mata berbasis korporasi tetapi juga penguatan aspek legal masyarakat, perhutanan sosial, sehingga ada *blended* antara pengelolaan-pengelolaan berbasis masyarakat dan korporasi. Ini tentu akan menciptakan ekosistem bisnis baru kehutanan. Ini pada tahun 2020, ketika UU Cipta Kerja (2021) kemudian di turunkan dalam bentuk PP dan Permen. Ditambah dengan pada akhirnya Net Sink FOLU di-*encourage* melalui SK Menteri yang tadi sudah disebutkan.

APHI sendiri sebenarnya bapak/ibu sekalian, sudah cukup lama, sejak tahun 2016 mencoba memproyeksikan bahwa asumsi basis temuan Prof. Dudung, 5% masih sangat kecil sekali kontribusi kita. Sehingga kita menyusun *roadmap* bahwa kehutanan ke depan harus *switch shifting*. Tidak hanya kayu, tetapi juga hasil hutan bukan kayu, *bioprospecting*, pangan, jasa lingkungan (ekowisata, karbon) dan energi biomassa serta energi terbarukan. Kami sudah proyeksikan di dalam *roadmap* kami dari 2019-2045. 2019 adalah revisi dari *roadmap* APHI tahun 2016. Kita sudah melihat bagaimana yang sekarang ini dikenal sebagai multi usaha kehutanan sudah kita potret dan bagaiaman ini nanti akan me-*generating* berkali-kali liat dari kontribusi sektor kehutanan saat ini.

Kita lihat misalnya di dalam infografis ini, pada tahun 2045, Indonesia puncaknya di Indonesia emas, total kontribusi sektor kehutanan dengan berbasis kayu, non kayu dan ekowisata ini skeitar USD 132 milyar. Dibandingkan dengan sekarang yang kurang lebih hanya sekitar USD 13,3-14 milyar. Hampir 10-11 kali lipatnya. Kita lihat memang karbon belum kita masukkan. Karena pada waktu itu kita masih agak kesulitan menghitung. Berharap *roadmap* akan kita revisi, akan kita hitung dan saya yakin persentase yang saat ini 76,8% (kayu); 19,9% (HHBK); 3,2% (ekowisata) pasti akan berubah. Dan kami berharap ini akan semakin turun, kemudian jasa lingkungan akan semakin naik. Bisa jadi akan menggeser HHBK nanti kalau memang aturan main sudah cukup tersedia.

Yang kemudian juga menjadi *trigger* pada kami, bagaimana multi usaha itu didorong, ada tuntutan yang sangat besar. Bagaimana pada tahun 2030, NDC Indonesia dipercepat, melalui strategi IFNET, pada tahun 2030 kalau dengan skenario NDC, pada sektor GRK FOLU memang menurun tapi pada 2030 kita masih menjadi pengemisi ± 216 juta ton. Dalam skenario LTS-LCCP, ini adalah akselerasi, pada tahun 2030, 140 juta ton dan akan terus meningkat 340 juta ton pada 2050, dengan total eisi bersih nasional menjadi 540 juta ton CO2e.

Kita lihat emisi GRK pada tahun 2030 dari FOLU sudah tercapau *net sink*. Ini yang memang menjadi target kita yang tentu pertanyaannya adalah bagaimana kita memprioritaskan rencana operasional yang sudah disusun ini. Bagaimana sumber serapan diakselerasi, dari percepatan tanaman tahunan; regenerasi hutan sekunder; afforestasi dan reforestasi; pengelolaan hutan tanaman dan pada saat yang sama kita juga mengelola, meminimalkan deforestasi, kebakaran gambut dan dekomposisi gambut. Jadi sebenarnya konteks yang kita lakukan tidak hanya supaya hutan itu tidak terdegradasi.

Kebutuhan yang sangat besar kalau kita lihat nanti di dalam *budget*, justru datang untuk kegiatan investasi di dalam meningkatkan serapan ini. Jadi tanaman tahunan, regenerasi, afforestasi dan hutan tanaman. Sebagai ilustrasi di sini saya lihatkan sebenarnya turunan dari data yang disampaikan oleh Pak Istanto tadi. Kita lihat bahwa deforestasi gambut, mineral dan degradasi dan konsesi sebagai bagian aksi mitigasi, nilainya relatif tidak begitu besar. Dibandingkan dengan investasi yang kita lakukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya *enrichment*, kemudian perbaikan tata kelola kegiatan di lapangan seperti misalnya RIL, PBPH HTI (menanam). Areal-areal yang mestinya produktif karena kuota deforestasi kita sudah habis. Sehingga yang harus kita lakukan adalah mengakselerasi tanaman HTI yang saat ini baru terealisasi 3,5 juta ha dibandingkan dengan tanaman/ izin yang 11 juta ha.

Kemudian juga ada rehabilitasi lahan tanpa rotasi, rehabilitasi dengan rotasi. Kalau kit atotal target *enrichment* kita, dalam rangka meningkatkan serapan ini ± 8,5 juta ha (2021-2030). Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana investasi harus didorong. Karena bisnis *as usual* yang sekarang ini kit masih tertatih-tatih. Kontribusi baru 6%, teman-teman banyak yang tidak aktif. Kita juga diberikan mandat untuk berkontribusi yang lebih. *Beyond business as usual*. Kalau kita juga tidak ada *effort* yang lebih, tidak ada insentif yang lebih maka target-target ini tentu akan sangat berat sekali tercapai. Oleh karena itu, perlu sebuah penghela yang harus kita lakukan untuk mendorong pengungkitnya supaya upaya-upaya untuk mendorong peningkatan serapan ini bisa tercapai.

Saya hanya mengutip data tadi, ada total Rp. 204 trilyun (45% dari pemerintah dan sisanya 55% dari swasta). Ini ada di dalam dokumen IFNE. Kurang lebih masing-masing USD 14,4 Milyar dan USD 8 Milyar. Tentu dengan situasi seperti ini, dari berbagai sumber pendanaan tadi, ada *green* sukuk dan pasar karbon domestik skema REDD, bahkan pasar karbon didorong. Dan tentu yang paling penting adalah pendanaan sektor swasta. Bagaimana instrumen investasi, hibah, obligasi pinjaman, ekuitas swasta, CSR, dll didorong.

Bagaimana kita menempatkan sektor usaha dalam konteks percepatan aksi mitigasi tadi? Dengan memasuki era pasca UU Cipta Kerja, karena ada perubahan PBPH. Kita boleh mengelola dalam skala *landscape* (kayu, non kayu, kawasan, jasa lingkungan, dll). Harus kita konstruksikan ke dalam aksi-aksi mitigasi terhadap kegiatan-kegiatan ini. Kalau kita simpulkan matriks yang menjadi rencana IFNET tadi ada pencegahan dan penurunan laju deforestasi, pengendalian degradasi hutan, pembangunan hutan tanaman, PHL (khususnya HT), rehabilitasi dengan rotasi dan pengelolaan lahan gambut.

Saya ingin memberikan penekanan di dalam slide ini, bahwa proses-proses yang kita lakukan tadi sudah dilakukan oleh pelaku usaha. Hanya karena ada tambahan non kayu, jasa lingkungan dan lain lain. Tetapi bahwa bisnis proses seperti biasa, mau tidak mau harus mengikuti proses ini. Harus ada *input*, proses dan *output*. *Input*-nya ada faktor produksi, modal, tenaga kerja dan lahan. Kemudian prosesnya ada aksi mitigasi. *Output*-nya ada produk dan pasar. Sehingga apapun aksi mitigasinya, yang menjadi pandangan *private sector,* harus menghasilkan sesuatu produk dan bisa dipasarkan. Apapun itu. Kita bicara SILIN, produknya tidak hanya kita nanam dan tidak kita tebang. SILIN kita tanam dan berharap suatu hari kita bisa tebang.

Kemudian agroforestri, rehabilitasi non rotasi, kita mau tanam jelutung, durian, alpukat, apapun. Itu adalah bagian dari seluruh proses bisnis yang harus ditempatkan ke dalam kerangka *input*, proses dan *output*. Begitu *outout* kita dapat, apakah *output* yang kita keluarkan dalam proses aksi mitigasi ini, akan mengembalikan pengembalian investasi dan ­re­investasi, terhadap keseluruhan bisnis proses ini. Dengan demikian yang diharapkan adalah bagaimana dan ini perlu pendalaman. Tadi dikatakan akan ada Permen yang akan menyusun tentang pemanfaatan nilai ekonomi karbon dan perdagangan, dll. Dan yang paling penting untuk kita adalah bagaimana skema-skema *financing, market* terhadap produk-produk yang dihasilkan proses multi usaha ini, harus menjadi bagian penting dalam rangka mengembalikan investasi dan reinvestasi.

Kami dari APHI terus menyuarakan ini. Karena ini menjadi faktor pengungkit utama untuk memastikan multi usaha kehutanan mendukung IFNET terjadi. Sehingga tanpa produk dan pasar. Misalnya kita mendorong agroforestri, ternyata produknya dan pasarnya, tidak mampu memberikan pengembalian yang layak. Dan tidak mampu memberikan dorongan investasi kembali. Meskipun itu memberikan kontribusi terhadap serapan emisi. Akhirnya itu tidak bisa *trade off*, harus berjalan paralel bahwa fungsi-fungsi untuk penyerapan emisi dan fungsi-fungsi dari sisi bisnis harus berjalan secara paralel.

Kami usulkan, bahwa kalau saya buat keragaan bisnis kehutanan, apapun (HTI, HPH, agroforestri dan RE), belum merupakan sebuah proses bisnis yang *feasible*. Sangat bisa kita pahami, banyak HPH dan HTI yang tidak aktif karena mereka tidak ter hulu ke hilir misalnya. Oleh karena itu kami berharap, kalaupun sebagai sebuah inisiatif baru bisa mendorong menjadi pengungkit ketidak kelayakan untuk investasi-investasi yang saya sampaikan. Jadi kita harus melihat bahwa karbon tidak berdiri sendiri sebagai sebuah investasi, tapi karbon merupakan *complementary* terhadap kegiatan-kegiatan bisnis kehutanan yang memang saat ini dari sisi keragaan tidak cukup layak untuk didorong.

Kami berharap dari kegiatan-kegiatan aksi mitigasi, kemudian ada pembiayaan, kalau karbon ini bisa kita jadikan *guarantee* untuk *finance* kemudian nanti hasilnya kita lakukan aksi-aksi mitigasi bisa kita kembalikan. Tentu keseluruhan proses yang tadi *input*, proses dan *output* akan menjadi sebuah bisnis proses yang bisa diandalkan, menjadi sebuah upaya untuk pencapaian NDC.

Berikut contoh-contoh agroforestri. Sebagai *closing remark*, apa yang menjadi catatan penting untuk kita diskusikan, bahwa pelaksanaan aksi mitigasi sektor kehutanan harus memenuhi bisnis proses. *Input*, proses dan *output*. Dan tidak *trade off*. Upaya aksi mitigasi saling melengkapi. Keragaan bisnis kehutaan yang saat ini perlu didorong, untuk mencapai skala bisnis yang *feasible* harus paralel dengan upaya-upaya untuk penurunan emisi.

Prasyarat penting adalah bahwa komunitas yang dihasilkan dari aksi mitigasi harus benilai tinggi. Konsep agroforestri. Insentif harus didorong. Karena target usaha tinggi, upaya tinggi, investasi besar maka untuk sektor FOLU sangat pantas dan layak untuk memberikan insentif seperti *tax holiday*, PNPB dan pemanfaatan nilai karbon. Mungkin perlu ada uji coba skala *pilot* untuk pengembangan komoditas unggulan dan skema pembiayaannya. Kami dengan KADIN saat ini sedang merancang apa yang disebut dengan *regenerative business forest top*. Untuk mencari titik resultante yang pas antara komunitas unggulan dengan skema pembiayaan sehingga itu bisa menjadi multi usaha yang diandalkan.

Yang terakhir, saya kira sangat penting bagaimana lintas K/L, Pusat-Daerah dan lintas sektor karena kami dari sektor tidak bisa berdiri sendiri, upaya-upaya itu harus terintegrasi dengan sektor utilisasi di sektor hilir (pemanfaatan industri). Kemudian dalam konteks penurunan dan *swaping* emisi dengan industri penghasil emisi harus ditemukan satu titik resultante yang pas. Berapa kira-kira sektor industri penghasil emisi memberikan penghargaan terhadap kami-kami di sektor hulu yang memberikan kontribusi yang cukup berat terhadap target-target IFNET. Terima kasih.

**Galuh Sekar Arum (Moderator) :**

Terima kasih banyak atas paparannya. Pertanyaan semakin hangat dan semakin banyak. Di youtube maupun di zoom sudah banyak pertanyaan. Ingin saya informasikan ada yang *online* dari Sydney dan dari Florida, demi mendengarkan bapak-bapak menjelaskan IFNET. Pertanyaannya mungkin ada beberapa yang sepertinya akan saya sampaikan tapi tidak bisa semua terjawab, karena banyak sekali pertanyaan yang masuk. Saya persilakan narasumber bersedia menuliskan jawaban di kolom *chat*.

Pertama pertanyaan dari Ibu Nur Komariah, untuk Pak Is. Tantangan terbesar dari IFNET 2030 seperti apa saja, mengingat targetnya yang sangat banyak pak. Lalu bagaimana strategi yang tepat untuk mengakselerasi pencapaian NSF 2030. Apakah melalui restorasi/ pendanaan? Silakan Pak Is.

**Ir. Istanto, M.Sc. (Direktur Bina Usaha Usaha Pemanfaatan Hutan, KLHK) :**

Baik tadi sudah saya sampaikan, untuk kebutuhan pendanaan, untuk bidang PHL saja sudah hampir 2 Trilyun. Ini rasanya tidak mungkin kalau dananya untuk IFNET dari pemerintah, harus ada dukungan pendanaan dari sumber lain. Misalkan PBPH yang nanti bis amendukung untuk IFNET. Seperti Pak Dharsono bisa mendukung usaha di bidang *carbon trade* atau Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Ini memang peluang besar untuk bisa mendukung kegiatan-kegiatan IFNET. Di samping itu juga nanti akan ada kegiatan-kegiatan dukungan dana dari pihak lain yang tidka mengikat untuk mencapai target IFNET. Karena memang cukup berat. Contohnya untuk kegiatan SILIN, atau kegiatan RIL perlu SDM yang mumpuni, komitmen dari para pemegang saham dan juga pendampingan-pendampingan ini memerlukan dana memerlukan keahlian SDM yang tangguh dan terampil. Karena untuk melaksanakan RIL/SILIN tidak mudah. Akhirnya tergantung dari pemegang saham.

Beberapa kali kami minta komitmen dari *owner* sesuai target yang sudah ditentukan di RKU saja, tidak semuanya tercapai. Karena dianggapnya biaya terlalu mahal, mereka untung kecil. Kalau saya sudah jawabannya pasti seperti itu. Mau tidak mau harus kita paksa. Di RKU harus kita tentukan. Contohnya di RKU kita tentukan harus 20% dari luas areal efektif untuk bisa SILIN, kadang ada yang tidak sanggup. Karena biaya mahal, untung kecil.

**Galuh Sekar Arum (Moderator) :**

Kalau saya boleh susul sedikit, dari Pak Dharsono tadi perlu ada kejelasan peraturan soal NEK, kalau itu sudah lebih jelas mereka mau. Bagaimana pak?

**Ir. Istanto, M.Sc. (Direktur Bina Usaha Usaha Pemanfaatan Hutan, KLHK) :**

Ya memang kalau Pak Dharsono saya tau, beliau belum punya Permen untuk NEK. Sehingga sering ditegur, karena memang sudah melakukan bisnis tapi belum ada peraturan. Tapi nanti di dalam NEK, Permen sudah disiapkan dari bisnis keuntungan PBPH yang melaksanakan perdagangan karbon ini akan ada kewajiban untuk membayar PNBP nya. Jadi kalau sekarang PNBP 10% dari keuntungan, nanti ada hitungan sendiri. Di Permen sudah ditentukan, bahkan ada pajak karbon. Jadi mungkin itu salah satu sumber pendanaan untuk mendukung upaya-upaya pencapaian target IFNET.

Kemudian juga ada pertanyaan lain, HPH/RE apakah bisa didorong untuk multi usaha? Sangat bisa, dan memang kedepannya kami akan arahkan untuk kesana. Memang multi usaha nanti akan kami dorong ke depan. Sudah ada satu yang sudah mulai disetujui, untuk HPH di mangrove kami sudah setujui untuk multi usahanya. Nanti bisa pemanfaatan kawasan melalui *silvofishery* dan juga ada pemulihan lingkungan. Salah satu HPH di KalBar. Mungkin nanti sebagai contoh. Yang lain yang tidak aktif nanti akan kita dorong kesana.

**Galuh Sekar Arum (Moderator) :**

Baik terima kasih. Saya akan kembali ke Pak Is nanti. Ada pertanyaan membara tentang HKM dan juga panduan-panduan terutama untuk HKM dan juga perhutanan sosial. Selanjutnya untuk Kang Dodik, pertanyaan dari Kang Asep. Pertanyaannya pendek sih tapi jawabannya saya rasa akan cukup panjang. Karena tentang perspektif yang ditawarkan dari Prof. Dodik ya, yaitu apakah sudah mulai melembaga di Manggal dan daerah juga di lembaga-lembaga terkait? Apakah ada keberatan tentang perspektif baru yang ditawarkan Prof. Dodik?

**Prof. Dodik Ridho Nurrochmat (Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB University) :**

Ya makasih. Ini sekaligus saya mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Kalau bilang melembaga agak sulit ya tapi kalau personal lembaga tentu sudah beberapa. Di PHL mayoritas sudah se-ide. Tapi di Dirjen lain sifatnya masih ­­spot-spot saja. Multi usaha sebelum UU Ciptaker sudah kita rumuskan sebenarnya. Bahkan ada Perdirjennya sampai juknis juklaknya sudah ada tetapi ketika mau dilaksanakan kan terganjal misalnya dokumen lingkungan.

Ini yang di PKTL misalnya, padahal kalau kita lihat multi usaha kehutanan kan sangat utama tidak boleh mengurangi tutupan lahan hutan. Kalaupun terpaksa harus mengurangi tutupan lahan hutan untuk jalan dsb, maksimal 5%. Kalau mengikuti itu, semua izin yang dapat izin dari PHL, seharusnya tidak perlu ada AMDAL baru. Jadi yang di surat edaran Menteri, SE 03 (2022) menjelaskan mana yang perlu AMDAL baru mana yang cukup revisi RKL, misalnya. Mestinya secara otomatis multi usaha tidak ada perubahan tutupan lahan mestinya tidak harus ada yang baru. Jadi tetap prosedurnya PBPH, harus ikut prosedur baru lagi. Kan ini jadi persoalan. Kalau PHL sudah memberikan izin misalnya otomatis itu seharusnya tidak perlu. Karena persyaratan utama dari multi usaha (PBPH), tidak perlu menurunkan tutupan tajuk. Jadi yang lain otomatis mengikuti. Kalau misalnya ada potensi penurunan tutupan, itukan belum diberikan izinnya dulu.

Dari PHL memberikan surat ke PKTL untuk diproses, masuk ke yang mana. Ini persoalan-persoalan di internal sendiri yang persoalan sektoral tapi juga sesungguhnya kita punya persoalan sub-sektoral. Lintas eselon 1 kan ada persoalan juga. Wajar karena semua di target IKUKU (Indikator Kinerja Utama) yang semuanya harus mengikuti itu, sesuai. Ini juga persoalan yang tidak mudah diurai dari webminar/ *talkshow* semacam ini. Ada persoalan-persoalan yang lebih substansial sesungguhnya.

Kemudian terkait dengan karbon, kita geser ke eselon 1 yang lain, Ditjen PPI (Pengendalian Perubahan Iklim), juga lain lagi pendekatannya. Mestinya menurut saya, mengurainya harus kita pilah antara yang prinsip dan sifatnya teknis. Kalau tidak wajar juga, kawan-kawan swasta mengeluh. Karena yang ditunggu-tunggu tidak datang. Regulasi poco-poco, keluarnya sedikit tapi tidak akuntabel. Ada Perpres, tapi tidak bisa untuk mengeksekusi. Kalau mau dieksekusi, persyaratan utama regulasi perdagangan karbon domestik harus terpisah dengan internasional. Kuncinya itu, sudah saya sampaikan. Kenapa demikian? Kalo sampai saat ini KLHK masih belum membolehkan untuk perdagangan karbon internasional karena ada takut kebocoran untuk NDC, IFNET harus kita jaga walaupun di situ masih ada perdebatan, okelah gapapa. Kalau menurut saya oke. Kita keluarkan masalah itu, kita lokalisir masalahnya. Jangan sampai masalah perdagangan karbon internasional merembet ke perdagangan karbon domestik, ini kacau. Padahal yang berminat untuk melakukan perdagangan karbon ini di dalam negeri sudah sangat banyak.

Kalau kita bicara di sektor energi, pertambangan, transportasi, sudah banyak sesungguhnya yg ingin melakukan perdagangan karbon domestik. Ini yang menurut saya harus kita pilih dan pilah. Mana yang sifatnya prinsip mana yang teknis. Yang sifatnya prinsip, standar. Standar untuk misalnya *certified emission* untuk masuk di SRN itu yang seperti apa, itu prinsip. Tapi mekanisme perdagangannya itu teknis. Jadi kita tidak perlu mengikuti mekanisme perdagangannya mengikuti mekanisme yang ditentukan oleh lembaga internasional misalnya.

Termasuk *database* nya, itu teknis. Maka di dalam Menteri Keuangan menegaskan, otoritas perdagangan di BEI. Maka ketika itu sudah masuk di bursa, kita perlu juga melanjutkan diskusi lebih teknis lagi. Kalau namanya bursa, yang diperdagangkan itu karbon/ apanya. Kita mesti ke substansial. Yang kita diskusikan bukan karbon. Karbon itu bukan *credible product*, karena tidak memenuhi persyaratan utama dari *creadible product* yaitu kelangkaan. Tidak ada unsur kelangkaan di karbon. Maka karbon bukan *creadible product*. Yang ada adalah *unit price*. Yang namanya 1 ton tetap 1 ton. Harganya 1 ton sekian. Harga berubah karena perubahan *determinant price*. *Determinant price* itu yang *creadible* sendiri produknya yaitu bukan karbon tetapi fungsi penyimpanan dan fungsi penyerapan karbon. Itu yang bisa diperdagangkan. Ini yang menjadi keliru. Kekeliruan ini yang mengacaukan pola berpikir, dimana ketika kita pergi ke lapangan, ke daerah ketemu dengan bupati, “saya setuju dengan perdagangan karbon tapi nanti jangan lupa truknya Pemda ya”. Di lain pihak negosiator kita masih *mix*, ketika kita *carbon pool* di Indonesia kan masih belum dihitung. Di Indonesia, furnitur, rumah kayu belum dihitung sebagai *carboon pool* yang merupakan *stocking* karbon di luar hutan.

New Zealand, Amerika apakah mereka menghitung? Saya pernah tanya apa alasan kenapa tidak menghitung? Sehingga kita menggunakan rumus yang kalau kita jeli sedikit saja kita ketemu keanehannya. Makanya kita bicara IFNET tidak emisi. Kalau HPH misalnya nebang hutan, hitung emisinya berapa? Ya pohon yang ditebang itu emisi. Sejak kapan kayu itu menyublim? Kayu kan bukan seperti kapur barus. Kalau kita nebang pohon, bukan emisi. Wong karbonnya masih ada di furnitur. Emisinya ada cara hitungnya sendiri. Saya sudah kasih cara hitung emisi dari *logging*.

Emisi itu adalah yang mengalami dekomposisi, alat-alat berat yang digunakan, dsb. Menghitung dekomposisi juga tidak mudah karena masing-masing jenis, kayu meranti, kruing itu beda ada yang puluhan tahun ada yang ratusan tahun tergantung dari jenis kayu, suhu, kelembapan dsb. Karena kita tidak menghitung *carbon pool* sebagai stok di luar hutan maka seolah-olah itu menjadi emisi semua. Ini yang menjadi tidak nyambung, alasannya karena kalau dihitung stok karbon kita bingung. Yang menghitung kan kita eksportir mebel, nanti mebelnya di Jepang di klaim oleh Jepang, mebel di Belanda di klaim oleh Belanda. Apa bedanya kita sama di Pemda tadi, ngangkut karbon pake truk tadi. Yang dihitung itu bukan benda nya tetapi fungsi dari penyerapan dan penyimpanan karbonnya yang dilaksanakan oleh hutan. Hutan sebagai fungsi serapan dan simpanan yang dihitung, jangan bicara mebelnya.

Saya rasa saya tidak usah jawab semuanya, karena kalau sudah *clear* perbedaannya saya rasa pertanyaan ikutan tadi masing-masing bisa kita jawab sendiri. Tapi menurut saya kita juga perlu kerja sama Pak Istanto, kita kan mengharapkan peran sektor swasta, bagaimanapun mereka akan mengarah ke keuntungan. Kawan-kawan kita hargai sudah membuat rencana operasional dan kapasitas yang bagus untuk membuat dokumen. Tetapi dokumen tadi tidak bisa diimplementasikan hanya dengan kapasitas membuatnya, tetapi juga perlu isi tas untuk merealisasikan. Itu yang kemudian harus kit alihat rasionalitasnya. Kalau anggaran tidak ada, apakah rencana bisa dicapai/ tidak. Oleh karena itu perlu semangat bersama yaitu penyederhanaan. Tidak usah berpikir terlalu rumit. Multi usaha ini selama 4 tahun pemanasan terus. Kapan mainnya.

Menurut saya perlu sama-sama ego sub-sektoral terutama perusahaan hutan, sama-sama. Karena kita berbicara tentang multi usaha kehutanan, bukan perkebunan. Ada syarat-syarat, ini kan multi usaha kehutanan memberikan ruang yg cukup banyak, cukup 30% saja tutupan hutan asalakan mulainya dari kawasan hutan yang tidak berhutan. Tapi jangan hutan alam minta untuk usaha. Ternyata *holding company* nya pabrik tapioka, pabrik gula. Kalau gitu syaa sarankan mengajukan saja izin HGU. Jangan mengajukan multi usaha tetapi diam-diam, ini tidak *fair.* Semua kita dukung ya, saya tidak anti gula walaupun sudah banyak mengurangi gula. Harus reproporsional jangan bikin kebun singkong di kawasan hutan. Kalau multi usaha keterlanjuran ada aturannya. Tapi kalau memang niatnya untuk kebun singkong atau lain-lain ajukan pelepasan. Lebih *fair*. Saya katakan sekali lagi yang berminat multi usaha bukan berasal dari bidang kehutanan. Terima kasih.

**Galuh Sekar Arum (Moderator) :**

Profokatif sekali dan mencerahkan. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan dari audiens Cuma saya izin dari Mbak Anggi dan Mbak Nur kalau boleh Pak Dharsono dan Pak Purwadi bisa menanggapi secara tertulis. Karena sekarang saya ingin Pak Dharsono dan Pak Purwadi menanggapi apa yang sudah disampaikan Prof. Dodik secara langsung. Silakan Pak Dharsono terlebih dahulu.

**Dharsono Hartono (CEO PT Rimba Makmur Utama) :**

Baik, terima kasih. Memang kita lihat perlu suatu kesepakatn, karbon itu apa. Apakah itu komoditas apakah itu *service*. Menurut saya masih belum jelas. Saya setuju dengan Prof. Dodik, sebenarnya karbon itu jasling dimana kita bisa menyerap karbon/ mencegah deforestasi. Jadi karbon itu tidak gampang karena itu jasling, sehingga orang itu bingung apakah ini dibawa, atau bentuk kayu. Jadi mungkin Prof bisa memberikan benar-benar fisik karbon itu kategori dari Undang-undang itu produk apa sih sebenarnya. Jasa, komoditas/ barang? Menurut saya itu penting. Memang dari Perpres banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan oleh teman-teman di KLHK. Kami kebtulan di KADIN, di APHI, kami siap membantu dan mendukung pemerintah membuat suatu peraturan yang bisa diimplementasi dan bisa terjadi pencapaian IFNET nanti. Saya rasa tugas teman-teman di KLHK berat. Kalau lihat Perpres, sangat banyak. Kami siap mendukung, karena ini bukan tugas pemerintah saja/ swasta saja, tetapi tugas bersama untuk mencapai target IFNET. Terima kasih.

**Galuh Sekar Arum (Moderator) :**

Terima kasih Pak Dharsono, sekarang beralih ke Pak Pur. Bagaimana menanggapi komporannya Prof. Dodik dan pernyataan Pak Is.

**Purwadi Soeprihanto (Sekjen APHI) :**

Perubahan-perubahan dan paradigma pergeseran lain-lain memang tidak mudah. Kami meyakinkan teman-teman usaha untuk *switching*  dari kayu menjadi *non timber* tidak mudah. Selama kayu komoditasnya lebih masih mempunyai *value* yang lebih tinggi. Salah satui upaya yang kita lakukan bagaimana me-*generate* komoditas-komoditas yang bisa menghasilkan *value* yang memiliki nilai komoditas tinggi. Itu yang menjadi pr kita bersama.

Dengan demikian maka, ketika kita berbicara menanam, rotasi, non rotasi apapun macam tanamannya, selama itu tidak bisa menghasilkan produk yang *valueable* yang tidak bis amenghasilkan produk yang kompetitif, jangan harap bahwa orang-orang akan tertarik berinvestasi. Meskipun karbon akan *leverage*. Karena itu kami berkali-kali menyampaikan, kita sudah belajar kelamaan. Kita tidak berani menerapkan apa yang kita pelajari. Karena itu, saya kira apa yang menjadi *lesson learn* sudah banyak. Kita perlu bagaimana *excercise* di lapangan. Kemudian *excercise* kebijakan itu paralel dengan kegiatan-kegiatan yang kita uji coba di lapangan. Kalau ternyata kegiatan-kegiatan uji coba ternyata ada yang salah, ada yang tidak pas, kebijakannya kita perbaiki. Atau koridor-koridor yang harus dilakukan oleh teman-teman ketika uji coba ternyata tidak pas, malah mendorong deforestasi >30% (misalnya), butuh kita perbaiki kembali. Tetapi pesan kami, yang perlu buat kami, kita mencoba saja sudah takut. Kemudian dari sisi regulasi dll belum bisa menyelesaikan harapan-harapan kita pada saat ini. Karena sedang dalam proses semua. Kita berharap penyiapan kebijakan paralel, kita uji coba di lapangan. Apapun, tidak hanya konteks karbon.

Saya sependapat proses-proses dokumen/ administratif (RKU, dok lingkungan, dll), gapapa kita uji coba dulu, yang paling gampang dulu. Supaya multi usaha kehutanan sejak tahun 2020, pasca UU Cipta Kerja, kita jalan. Pesan kami, ayo kit aberani mencoba, jangan takut salah. Kalau salah diperbaiki, sehingga kita tau dimana kesalahan kita. Kalau tidka begitu kita tidak tahu dimana kita salah dan dimana kita berhasilnya. Itu saja, terima kasih.

**Galuh Sekar Arum (Moderator) :**

Terima kasih banyak, Pak Pur. Saya ingin kembali ke Pak Is, dengan semangat teman-teman dalam mencapai target IFNET ini, mungkin bisa respon dan bagaimana kita bisa sama-sama mencapai target kita bersama di tahun 2030. Silakan Pak Is.

**Ir. Istanto, M.Sc. (Direktur Bina Usaha Usaha Pemanfaatan Hutan, KLHK) :**

Baik terima kasih. Ini ada pertanyaan yang menarik, apakah bekas tambang bisa didaftarkan sebagai FOLU. Sebenarnya nanti ada bidang lain ya, juga bisa nanti. Karena yang hari ini menjadi narasumber kan hanya saya, tadi juga ada pertanyaan rehabilitasi ini mungkin Pak Hilmi bisa menjelaskan tentang rehabilitasi tambang bekas galian. Jadi nanti Bu Menteri ke arah ke depan, lokasi-lokasi bekas tambang bisa didaftarkan untuk entitas bisnis karbon dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan, menghutankan kembali areal bekas tambang.

Kemudian juga tadi ada pertanyaan HKM, juga sebenarnya ada bidang saya tetapi ada pokja nya sendiri. Pokja yang khusus untuk perhutanan sosial. Bisa juga konsultasi. Ini HKM di Labuan Batu Kara ini belum jalan dan perlu kerja sama. Ini juga sebenarnya kalau ini bisa jalan HKM ini nanti bisa mendukung target dari IFNET. Harusnya HKM yang sudah diberikan izin, bisa jalan. Sehingga bisa mendukung target dari IFNET. Karena di HKM bisa dikembangkan multi usaha seperti yang Prof. Dodik sampaikan.

Kemudian ada yang nanya renopnya untuk bidang 1 PHL ini sebenarnya sudah kita susun dan serahkan kepada koordinatornya yaitu Sekdit nya Ditjen PKTL. Besok akan kita bahas dengan Ibu Menteri dan para tim FOLU. Renop (rencana operasional) di tingkat tapak sudah kita siapkan, besok akan kita matangkan dulu. Sehingga perlu penyesuaian kembali dan masih ada data-data yang bertentangan.

Kemudian di LTS-LCCP ini di tabel kan ha, tetapi ada juga di target FOLU satuannya jadi 140 juta ton. Mungkin Prof. Dodik bisa menyampaikan bagaimana mengkonversi dari ha ke ton. Sudah ada hitungannya sebenarnya. Jadi dalam 1 ha kalau kita merestorasi hutan, berapa yang bisa diserap dari karbonnya sudah dalam bentuk ton. Itu ada konversinya. Saya tidak bisa menjelaskan detail, karena mungkin pakarnya bisa menjelaskan. Jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan yang teknis sekali. Dan saya juga tidak bisa menjelaskan.

Kemudian juga tadi PS apakah bisa mendukung IFNET, ini sangat bisa mendukung. Kegiatan dari PS diharapkan untuk mendukung target-target IFNET. Mohon maaf saya belum bisa menjawab secara detail, karena kami sebenarnya ada buku FOLU Net Sink yang mungkin bisa dibaca kembali dan tidak ada yang salah. Karena misalnya konversi ha ke ton, karena memang menghitung emisi tidak mungkin dalam bentuk ha. Misalnya untuk menghitung lahan-lahan terbuka misalnya emisinya berapa.

Kalau untuk terkait multi usaha terlalu lama pemanasan, saya sendiri juga sudah keringetan tapi belum bisa dilakukan. Perubahan dokumen lingkungan sudah numpuk, saya hitung sampai 6.000 katanya. Jadi mengantrinya panjang. Dan itu bukan di kami. Kalau di kami sebenarnya tidak usah menggunakan perubahan dokumen lingkungan. Contohnya HPH mau mengajukan multi usaha, HPH/HTI kan sudah punya AMDAL. Kalau RE mungkin tidak perlu AMDAL. Seharusnya kalau dia hanya akan berubah kegiatannya, misalnya dari menebang kayu ke pemulihan lingkungan/ jasa lingkungan lain, kenapa sih harus perubahan dokumen lingkungan saya sudah pernah tanya ke Pak Direkturnya, yang sekarang menjadi Kabadan PSE ini. Karena di dalam dokumennya tidak disebutkan kegiatan-kegiatan yang berubah itu kalau dulu pemanfaatan hutan kayu, menjadi jasa karbon/ wisata/ jasa lingkungan, dll misalnya. Luasannya juga berubah, sehingga perlu penyesuaian dokumen lingkungan. Alasannya seperti itu jadi kami mengikuti saja. Itu saja yang bisa saya jelaskan, terima kasih.

**Galuh Sekar Arum (Moderator) :**

Terima kasih pak. Saya menyadari sudah pukul 12.10 WIB, pertanyaannya masih banyak, masih menggelitik. Dan masih ingin dilanjutkan Cuma kit amemang dibatasi oleh waktu. Saya mau menanyakan saja sekalian satu pertanyaan yang bisa menjadi *closing statement*, apa titik ungkit yang harus kita lakukan agar kit abisa menggerakan proses IFNET ini dari proses persiapan, menuju implementasi. Silakan bapak-bapak.

**Dharsono Hartono (CEO PT Rimba Makmur Utama) :**

Mungkin kata kuncinya yang bisa saya jawab itu kita harus siap mencoba, dan tidak harus sempurna. Bagi saya tawaran Pak Pur sangat baik. Mungkin kit aharus bisa memberi contoh ke lapangan/ usaha/ survey, kita mencoba tidak perlu takut kalau salah. Salah bisa diubah. Dan kita diharap untuk tidak menjadi sempurna. Saya rasa itu kalau tidak nanti kita masih seperti poco-poco terus. Masih pemanasan saja terus. Karena kita kadang-kadang, merasa bahwa kita itu diberikan kewajiban untuk sempurna. Menurut saya itu jadi masalah, itu dari saya.

**Galuh Sekar Arum (Moderator) :**

Baik, terima kasih Pak Dharsono. Dari Pak Dharsono itu harus siap mencoba. Kemudian apabila ada kesalahan itu tidak apa-apa, menjadi pembelajaran. Silakan Pak Pur.

**Purwadi Soeprihanto (Sekjen APHI) :**

Kalau boleh lebih dari satu ya. Saya kira ada 2 pengungkit. Yang pertama kebijakan dan regulasi. Tidak hanya regulasi di kehutanan dan lingkungan hidup ya tetapi juga regulasi di KLHK tetapi juga regulasi di sektor lain yang saya kira harus segera duduk bersama, sinergi. Bahwasanya saat ini saya mendengar *bottle necking* di penyiapan-penyiapan kebijakan NEK, NDC dan lain-lain ini justru banyak datang dari sektor lain di luar kehutanan. Karena terkait integrasi bagaimana hulu-hilir pemanfaatan pencapaian target-target itu (tidak hanya dalam konteks NDC), tetapi konteks-konteks industri lain.

Yang kedua, pihak kehutanan tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, kami berusaha membuat ­*regenrative hub* *forestry business* karena sekat-sekat komoditas sebenarnya tidak relevan lagi. Ini biasanya Prof. Dodik yang ngomporin lagi. Ketika kita berbicara multi usaha kehutanan, sekat-sekat bahwa ini komoditas kehutanan dengan non kehutanan seharusnya sudah tidak ada lagi. Yang penting dia bisa menyerap emisi, itu merupakan tanaman keras yang itu juga bisa kita campurkan, kemudian itu bisa kita sambungkan dengan sektor apapun.

Sehingga sektor kehutanan bisa memberikan kontribusi, tidak hanya bisa menyelesaikan *problem* kontribusi terhadap kayu, tetapi di lihat dari sisi farmasi, bioperspektif dll, saat ini lebih banyak orang bicara pertanian, perkebunan selalu berbicara itu wewenang yuridisi Kementerian Pertanian. Ini ketika kita bicara IFNET, tidak relevan lagi ini komunitas kehutanan dan non kehutanan. Saya kira bagaimana menginternalisasi ini/ melembagakan ini mari bergerak dalam satu vektor dalam rangka kawasan hutan dapat dioptimalkan dengan berbagai jenis tanaman. Yang penting tidak deforestasi, tidak mengurangi 30% yang dibatasi tadi dan kita bisa dorong optimalisasi kawasan hutan yang memang sudah terdegradasi. Terima kasih.

**Galuh Sekar Arum (Moderator) :**

Baik, terima kasih banyak Pak Pur sudah berbagi 2 hal yang menjadi pengungkit dari kita untuk bisa bergeser dari proses belajar ke proses implementasi. Saya beralih ke Pak Is, silakan.

**Ir. Istanto, M.Sc. (Direktur Bina Usaha Usaha Pemanfaatan Hutan, KLHK) :**

Baik, terima kasih. Tadi sudah banyak disampaikan teman-teman, untuk sektor dari pemerintah ini memang seharusnya segera ada perdebatan regulasinya. Regulasinya memang harus segera disiapkan. Seharusnya regulasinya seharusnya memang yang mudah agar dunia usaha mudah memperoleh pelayanan, melakukan usahanya dan tidak bertele-tele. Ini yang memang sangat diperlukan. Sontoh tadi, jangan terlalu lama pemanasan tapi tidak jalan-jalan. Saya lebih suka implementasi jalan dahulu, tidak usah ada aturan-aturan yang rumit yang akhirnya dunia usaha tidak jalan. Ini yang mungkin memang bukan hanya di sektor PHL saja tetapi mungkin di eselon 1 yang lain, contojhnya Ppi, PKTL dan di Kementerian yang lain. Karena nanti juga ada di Kemenkeu akan mengatur Permen sendiri penjabaran dari Kepres 98. Nanti ada Permen tentang pajak karbon. Kemudian nanti di sektor industri juga ada Permen tersendiri. Sehingga nanti Permen-permen yang dibuat ini jangan sampai membelenggu teman-teman dunia usaha. Ini yang nanti perlu koordinasi, kerja sama antar Kementerian. Ini yang memang agak berat, levelnya tingkat Menteri untuk mensinkronkan aturan yang ada.

Lalu yang kedua juga ada sebenernya kami juga mohon ini komitmen dari dunia usaha untuk pencapaian IFNET. Contohnya untuk RIL, SILIN ini memang harus ada komitmen. Tentu dihitung dari hitung-hitungan ekonominya masuk/ tidak. Ini yang memang perlu komitmen dari dunia usaha, dan juga dari pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Karena kalau tidak ada komitmen dari pihak-pihak yang saya sebutkan tadi IFNEt akan sulit dilaksanakan di lapangan.

Yang terakhir adalah koordinasi semua pihak. Hal ini mudah diucapkan tetapi sulit dilaksanakan. Kami juga apresiasi sebenarnya kepada Pak Dharsono, sudah langsung implementasi di lapangan, sudah jalan begitu sudah bagus, sudah ada pemasukan, ternyata aturan belum siap. Kemudian jadi ribut, jadi ramai, kemudian ada konsekuensi tertentu yang bisa menghambat usaha Pak Dharsono dan teman-teman yang mirip, terutama RE. Pemerintah harus bijak dan mengambil keputusan yang cepat untuk ini. Sekian, terima kasih.

**Galuh Sekar Arum (Moderator) :**

Baik terima kasih Pak Is. Sebelum ke Prof. Dodik saya mengingatkan kepada bapak/ibu di zoom maupun di youtube silakan juga menuliskan berbagi kesimpulan dan pembelajaran dari diskusi hari ini. Satu kalimat yang menyimpulkan pembelajaran bapak/ibu tentang peran bisnis kehutanan dalam mencapai IFNET 2030. Silakan Prof. Dodik.

**Prof. Dodik Ridho Nurrochmat (Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB University) :**

saya bagian menyimpulkan saja ini. Saya rasa semangat kit asama, semangat berkolaborasi dan bersinergi, bahwa IFNET adalah kepentingan kita bersama. Sehingga idealnya bersinergi, tetapi kalau tidak bisa membantu jangan mengganggu, kira-kira seperti itu. Nah ini saya tidak ingin menunjuk siapa-siapa saja, tapi sadar diri apabila kit amasih menjadi gangguan/ ganjalan menurut saya ya sebaiknya instrospeksi semuanya. Sudah waktunya kita *action*. Dari Fakultas Kehutanan, Pertanian, Lingkungan kalau yang suka usul ya sudah cukup. Mungkin kita cukupkan bagaimana untuk mengimplementasikan.

Saya rasa itu ya, semangat kita kalau bisa bagaimana kita membuat sederhana. Bukan menyepelekan masalah, tetapi bagaimana membuat maslaah yang rumit bisa menjadi terurai kalau kita memandangnya/ menyikapinya dengan sederhana sehingga kit abisa berjalan bersama-sama. Saya khawatir kalau semua mikirnya rumit terus tidak jalan-jalan. Belum jalan saja sudah pusing duluan. Jadi ini yang menurut saya sama-sama kit acoba, tidak boleh bosan. Saya yakin semuanya, ya akademisi, pengusaha, birokrasi, ada titik-titik tertentu yang sudah jenuh. Tetapi itulah dinamikanya, di satu sisi ada yang sudah mulai jenuh, di sisi lain ada yang baru semangat mulai. Kita juga harus menjaga stamina, supaya tujuan kita di 2030 bisa tercapai. Terima kasih.

**Galuh Sekar Arum (Moderator) :**

Baik terima kasih banyak Prof. Dodik, Pak Istanto, Pak Pur dan juga Pak Dharsono atas *sharing*, semangat dan pencerahannya. Mudah-mudahan tidak bosan. Kalau dari sisi komunikasi, ketika kita akan membuat perubahan, yang menjadi inovator biasanya Cuma 16%. Mari kalau ada yang mau memulai, dari sektor manapun (masyarakat, NGO, bisnis) 16% dulu yang disasar. Itu pun luar biasa, biasanya *effort* yang kita keluarkan untuk menggaet yang 16% itu sudah luar biasa. Baru nanti akan ada *early majority* dan lainnya. Tetapi juga biasanya ada yang tidak mau, untuk inovasi apapun 16% persen dari masyarakat bisanya tidak akan mau berubah. Jadi mudah-mudahan paling tidka kita sampai 2030, 16% dari komunitas yang luas ini bisa mendukung pencapaian IFNET.

Dan tidak bosan-bosan, konsistensi biar kita bisa menjaga stamina hingga 2030. Lalu bapak dan ibu, kita masih ada 4 rangkaian diskusi lagi, dan berbagai macam pendekatan, tolong dinantikan seri berikutnya. Jangan lupa untuk melihat *youtube* dan semua sosial media Yayasan Madani Berkelanjutan dan Forest Digest, kita ada di *instagram, facebook, linkedin, youtube*, dll. Silakan di *follow* juga. Terima kasih banyak bapak dan ibu atas partisipasinya sudah berkenan bersama dengan kita, belajar bersama-sama tentang peran bisnis kehutanan dalam mencapai FOLU Net Sink 2030. Mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak dan ibu. Saya berterima kasih bisa belajar banyak dari pertanyaan-pertanyaan bapak dan ibu sebagaimana saya belajar dari narasumber kita. Terimakasih kepada bapak-bapak narasumber, semoga tidak bosan untuk nanti bergabung lagi dalam acara-acara kami selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, saya cukupkan sampai di sini, wassalamualaikum wr wb. Sampai jumpa.